

Inventarisasi MOU

Dalam Negeri & Luar Negeri

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

**Direktorat
Kebudayaan**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2005**

382.93

WV

Inventarisasi MOU

Dalam Negeri & Luar Negeri

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2005

KATA PENGANTAR

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata c.q. Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata menyambut gembira diterbitkannya BUKU INVENTARISASI MOU DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI Periode 2000-2005 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan dapat menjadi pedoman serta rujukan bagi para pejabat atau petugas yang diberi kewenangan melakukan evaluasi serta tindak lanjut pelaksanaan daripada semua MOU yang telah ditandatangani dalam periode 2000-2005.

Selain itu buku ini dapat pula menjadi referensi bagi pembuatan draft MOU selanjutnya oleh pejabat atau petugas dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata serta instansi terkait lainnya.

Buku inventarisasi ini dapat diterbitkan dengan bantuan berbagai pihak, untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, Desember 2005

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

DAFTAR ISI

- Kata Pengantar.....	i
- Daftar Isi.....	iii
- Pendahuluan.....	1-2
1. MOU DALAM NEGERI	
1. Kesepakatan Bersama Antara Dep.Budpar dan BPS tentang Pengembangan Statistik Budpar.....	3-5
2. Kesepakatan Bersama Antara Dep.Budpar dengan Depnaker dan Transmigrasi tentang Promosi Pariwisata oleh tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.....	6-8
3. Kesepakatan Bersama Antara Dep.Budpar dan PT. Televisi Republik Indonesia (Persero) tentang Peningkatan Apresiasi Seni, Masyarakat dan Pariwisata.....	9-11
4. Perjanjian Kerjasama antara Dep.Budpar dengan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Tentang Pengembangan dan Pelestarian Wisata Ziarah serta Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata di Lingkungan Nahdhatul Ulama.....	12-15
5. Kesepakatan Bersama antara Dep.Budpar dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tentang Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Wawasan Anggota Gerakan Pramuka dibidang Kebudayaan.....	
6. Kesepakatan Bersama Kementerian Budpar dengan Universitas Gajah Mada.....	16-19
2. MOU LUAR NEGERI	
1. Agreement on Cultural and Education Cooperation between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Spain.....	23-26
2. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Croatia on Cultural and Educational Cooperation.....	27-30
3. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on Cooperation in Tourism in the Sector.....	31-33
4. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela on Cultural and Education Cooperation.....	34-37
5. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Tourism Cooperation.....	38-41
6. Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines on Tourism Cooperation.....	42-45

7.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Co-operation in the fields of education, science and culture.....	46-49
8.	Memorandum of Understanding between the Government of the People's Democratic Republic of Algeria on Tourism Cooperation...	50-53
9.	Memorandum of Understanding between the Office of State Ministry of Tourism and Arts of the Republic of Indonesia and the Ministry of Tourism and Antiquities of the Hashemite Kingdom of Jordan on Cooperation in Tourism.....	54-57
10.	Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Cultural Cooperation.....	58-61
11.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hellenic Republic on Cultural and Educational Cooperation.....	62-65
12.	Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Tunisia on Cooperation in the Field of Tourism.....	66-68
13.	Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran on Tourism Cooperation.....	69-71
14.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cultural Cooperation.....	72-75
15.	Arrangement between the Government of the Democratic People's Republic of Korea and the Government of the Republic of Indonesia Concerning Cultural Exchange Program for the Year Of Juche 92-94 (2003-2005).....	76-79
16.	Arrangement between The Government of Republic of Indonesia and the Government of Republic of India Regarding Cultural Exchange Program for the Years 2001-2003.....	80-83
17.	General and Financial Provisions Covering the Exchanges Under the a Arrangement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of Republic of India Regarding Cultural Exchange Program for the Years 2001-2003.....	84-85
18.	Memorandum of Understanding between the Department of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia and the Minister Without Portfolio in Charge of Regional Development and Covergence of The Republic of Hungary on Tourism Cooperation..	86-89
19.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of People's Republic of China on Cultural Cooperation.....	90-93
20.	Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government Republic of India on Cooperation in Field of Tourism.....	94-97

21. Arrangement between the State Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia and the National Tourism Administration of the People's Republic of China on the Implementation Plan of Outbound Travel By Chinese Citizens To Indonesia..... **98-102**

P E N U T U P..... **103**

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terjadinya krisis multidimensi yang berkepanjangan di tanah air mengakibatkan terpuruknya citra Indonesia, termasuk sektor kepariwisataan Indonesia di dunia internasional. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan terjadinya berbagai masalah di dalam negeri seperti, terjadinya peledakan bom di berbagai tempat (Bom Bali I & II, Bom di Kedutaan Australia, Bom di Hotel JW Marriot-Jakarta), terjadinya aksi terorisme, wabah SAR dan flu Burung. Dampaknya adalah terjadinya penurunan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia secara signifikan akibat banyaknya negara-negara mengeluarkan travel warning ke Indonesia. Hal ini merupakan tantangan bagi Indonesia untuk memulihkan citra pariwisata nasional dan mempertahankan posisi sebagai salah satu destinasi utama yang menarik, aman dan unik untuk dikunjungi wisatawan mancanegara.

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagai instansi pemerintah di tingkat pusat, berbagai upaya telah dilakukan, salah satu diantaranya adalah menjalin kerjasama dengan negara-negara mitra sahabat dalam lingkup bilateral dan multilateral di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip kesamaan, saling pengertian dan saling menghormati. Di dalam negeri, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata juga menjalin kerjasama dengan beberapa instansi terkait, lembaga pendidikan dll.

Program peningkatan kerjasama yang dilakukan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata umumnya terfokus pada kegiatan pemasaran dan promosi, pengembangan produk, pengembangan SDM pariwisata, penelitian dan pengembangan, investasi serta pertukaran kebudayaan.

Kerjasama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan negara mitra sahabat di luar negeri maupun dengan instansi/lembaga terkait di dalam negeri dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kesepakatan Kerjasama (Memorandum of Understanding).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama (MOU) yang telah ditandatangani maka perlu Departemen

Kebudayaan dan Pariwisata c.q. Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata perlu menginventarisir MOU yang telah dilaksanakan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pembuatan buku ini adalah terinventarisasi beberapa Memorandum of Understanding penting yang telah dilakukan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata baik dengan negara-negara mitra sahabat mapun dengan instansi/lembaga terkait di dalam negeri.

Adapun tujuannya adalah : tersedianya data beberapa MOU yang penting sebagai bahan untuk referensi pimpinan dan staf Departemen Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan MOU yang telah ditandatangani.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan adalah Inventarisasi MOU Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang terdata periode 2000-2005, meliputi :

1. Perjanjian Internasional dengan negara-negara mitra sahabat/Lembaga Internasional lainnya, khususnya Memorandum of Understanding (MOU);
2. Perjanjian Kesepakatan Kerjasama (MOU) dengan Lembaga/Instansi Terkait di Dalam Negeri;

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK
T E N T A N G
PENGEMBANGAN STATISTIK KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : KM.11/PW.001/MKP-2005
NOMOR : 002/V/KS.TAHUN 2005-12-12**

Pada hari ini Jum'at tanggal satu April tahun dua ribu lima bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini "

1. **JERO WACIK** : Menteri Kebudayaan dan Pariwisata berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **CHOIRIL MAKSUM** : Kepala Badan Pusat Statistik berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statatistik untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa dalam berbagai pengambilan kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata perlu dukungan data yang akurat, konsisten, teratur dan berkesinambungan;
- b. bahwa data yang diperlukan tersebut merupakan hasil pengembangan metode dan konsep statistik yang sesuai dengan standar nasional dan internasional;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam Rangka Pengembangan Statistik Kebudayaan dan Pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pengembangan metode dan konsep statistik kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan perkembangan standar statistik nasional dan internasional;
- b. pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data statistik kebudayaan dan pariwisata ; dan
- c. penyediaan dan pendayagunaan sumber daya yang dibutuhkan dalam batas kemampuan masing-masing pihak untuk pengembangan statistik kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK PERTAMA , mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan indentifikasi dan inventarisasi kebutuhan data kebudayaan dan pariwisata;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensinya melakukan pembinaan di bidang statistik kebudayaan dan pariwisata;
- (3) PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan statistik kebudayaan dan pariwisata;
 - b. menyediakan dan mendayagunakan sumber daya masing-masing dalam pengembangan statistik kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini di bebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Jangka Waktu

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak; Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kesepakatan kedua belah pihak tertuang dalam bentuk tertulis.

Pasal 6
Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau pejabat lain yang ditunjuk dalam bentuk perjanjian pelaksanaan yang merupakan bagian tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini

Pasal 7
Ketentuan Penutup

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli. Bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh kedua belah pihak pada saat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Ir. Jero Wacik

PIHAK KEDUA
Ka. Badan BPS

Choiril Maksum

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DENGAN
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG
PROMOSI PARIWISATA OLEH TENAGA KERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI
NOMOR ; KM.09//PW.202/MKP/2005
NOMOR : KEP.64/MBN/III/2005**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Jero Wacik** Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Fahmi Idris** Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal ini sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara diperlukan program bersama untuk meningkatkan Promosi Pariwisata Indonesia di luar negeri secara terpadu, efektif dan efisien;
- b. bahwa Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan salah satu unsur yang dapat berperan dalam melakukan Promosi Pariwisata Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Promosi Pariwisata yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sesuai dengan tugas dan fungsi kedua belah pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan

1. Promosi Pariwisata adalah suatu kegiatan yang meliputi penyebarluasan informasi pariwisata Indonesia kepada kalangan tertentu sebagai target sasaran di luar negeri.
2. Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan dalam upaya Promosi Pariwisata Indonesia oleh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dengan membantu memberikan gambaran dan memperkenalkan potensi Pariwisata Indonesia di Luar Negeri.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Promosi Pariwisata Indonesia agar masyarakat mancanegara tertarik untuk mengadakan kunjungan ke Indonesia.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi penyebarluasan informasi dan bahan-bahan Promosi Pariwisata Indonesia di luar Negeri serta penyelenggaraan pembekalan pengetahuan kepariwisataan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyediakan informasi dan bahan-bahan Promosi Pariwisata Indonesia ; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam menyusun program Promosi Pariwisata di luar negeri.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyediakan informasi rencana keberangkatan calon Tenaga Kerja Indonesia kepada PIHAK PERTAMA ; dan
 - b. Menyampaikan bahan-bahan Promosi Pariwisata kepada setiap calon Tenaga kerja Indonesia.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyusun program pembekalan kepariwisataan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang akan ke luar negeri; dan
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Promosi Pariwisata di luar negeri.

Pasal 5

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata membentuk Tim Pelaksana yang keanggotaannya terdiri dari pejabat Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 6

Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Jangka Waktu

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8

Ketentuan Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 9

Ketentuan Penutup

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama .
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi

Fahmi Idris

PIHAK KEDUA

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Jero Wacik

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DAN
PT. TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PENINGKATAN APRESIASI SENI MASYARAKAT DAN PARIWISATA
MELALUI MEDIA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SKB.02/KS.001/Sekjen/DKP/05
NOMOR : 058/SP/TVRI/VIII/2005

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh dua Agustus tahun dua ribu lima bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SAPTA NIRWANDAR** : Sekretaris Jenderal Kebudayaan dan Pariwisata berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. **YAZIRWAN UYUN** : Direktur Utama PT. Televisi Republik Indonesia (Persero), berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Televisi Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Peningkatan Apresiasi Seni Masyarakat dan Pariwisata diperlukan untuk melestarikan dan memberdayakan karya seni yang memiliki kekhasan dan keunikan.
- b. Bahwa agar Peningkatan Apresiasi Seni Masyarakat dan Pariwisata lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu disebarluaskan melalui media televisi yang mampu menjangkau seluruh wilayah nusantara serta memiliki visi yang sama dalam mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Peningkatan Apresiasi Seni Masyarakat dan Pariwisata melalui media Televisi Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

T u j u a n

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk Peningkatan Apresiasi Seni Masyarakat dan Pariwisata, mengingat karya seni memiliki nilai-nilai budaya yang memperkuat Jati Diri Bangsa untuk mempererat dan membentuk jiwa Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- a. Penyediaan media untuk Peningkatan Apresiasi Seni Masyarakat dan Pariwisata
- b. Penyediaan dan pendayagunaan sumber daya yang dibutuhkan dalam batas kemampuan masing-masing pihak untuk Peningkatan Apresiasi Seni Masyarakat dan Pariwisata.

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK PERTAMA , mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan identifikasi dan inventarisasi serta pemantauan dalam rangka Peningkatan Apresiasi Seni Masyarakat dan Parwisata.
- (2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensinya melakukan penyediaan sarana melalui media Televisi Republik Indonesia
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Peningkatan Apresiasi Seni Masyarakat dan Pariwisata
 - b. Menyediakan dan mendayagunakan sumber daya masing-masing pihak dalam Peningkatan Apresiasi Seni Masyarakat dan Pariwisata

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 5

P e m b i a y a n

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini

dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kesepakatan kedua belah pihak tertuang dalam bentuk tulisan

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Besama ini, Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
Ketentuan Lain-lain

- (1) Keterikatan kedua belah pihak dalam kesepakatan Bersama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9
Ketentuan Penutup

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh kedua belah pihak pada saat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani .
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Yazirwan Uyun

Dr. Sapta Nirwandar

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
DENGAN
PENGURUS BESAR NAHDAHATUL ULAMA (PBNU)
NOMOR : KS.001/2/20/MKP/2005
NOMOR : 208/B.II.03/9/2005**

**PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN WISATA ZIARAH
SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARIWISATA
DI LINGKUNGAN NAHDHATUL ULAMA**

Pada hari Senin tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu lima, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. Jero Wacik , SE.** : Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **K.H HASYIM MUZADI** : Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa potensi wisata ziarah yang ada di Indonesia sangat besar dan perlu dikelola dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengembangan dan pelestarian wisata ziarah merupakan salah satu kegiatan prioritas dalam rangka pengembangan Pariwisata Nasional.
- b. bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata ziarah sangatlah penting guna memberdayakan masyarakat sekitar lokasi wisata ziarah. Pengurus Besar Nahdhatul Ulama memiliki kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat serta perlindungan, pengembangan dan pelestarian lokasi-lokasi wisata ziarah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengembangan dan pelestarian wisata ziarah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Kegiatan**

Kegiatan Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Peningkatan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan pengelolaan wisata ziarah di lingkungan masyarakat Nahdhatul Ulama dimana tempat wisata ziarah berada;
- b. Penyebarluasan informasi, keragaman, keunikan wisatawan ziarah kepada jajaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata serta Pengurus Nahdhatul Ulama se Indonesia melalui pembuatan dan penyebaran film dokumentasi
- c. Menginventarisasi berbagai keunikan, keragaman, keindahan dan sejarah tempat-tempat wisata ziarah secara lengkap melalui pembuatan dan penerbitan serta penyebaran buku wisata ziarah nusantara.
- d. Koordinasi dalam pelayanan kepada masyarakat pariwisata yang berkaitan dengan pengembangan wisata ziarah nusantara; dan
- e. Mengembangkan Diklat Pariwisata dan Sosialisasi Sadar Wisata dikalangan umat Islam khususnya di lingkungan masyarakat Nahdhatul Ulama.

Pasal 2

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :
 - a. Menyediakan sarana dan bahan-bahan serta tenaga-tenaga penceramah untuk kegiatan pelatihan wisata ziarah di lingkungan masyarakat Nahdhatul Ulama dimana tempat wisata ziarah berada ;
 - b. Menyediakan dan mempersiapkan sarana untuk penyebarluasan informasi, keragaman keunikan wisata ziarah kepada jajaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata serta Pengurus Nahdhatul Ulama se-Indonesia;
 - c. Menyediakan dan mempersiapkan sarana untuk pembuatan dan penerbitan buku wisata ziarah;
 - d. Menindak lanjuti laporan PIHAK KEDUA tentang segala kegiatan dalam rangka pengembangan dan pelestarian wisata ziarah; dan
 - e. Menyelenggarakan Diklat Wisata Ziarah dan Sosialisasi Sadar Wisata Khususnya bagi generasi muda Nahdhatul Ulama.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :
 - a. Mengkoordinasikan masyarakat dan pengurus Nahdhatul Ulama yang berkaitan dengan bidang pelatihan

- b. Menunjuk tim untuk melaksanakan pembuatan dan penyebaran pembuatan film dokumenter.
 - c. Membuat tim untuk pembuatan, penerbitan dan penyebaran buku wisata ziarah
 - d. Menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan pelaksanaan pelestarian wisata ziarah ; dan
 - e. Mengkoordinasi peserta pendidikan dan Latihan Wisata Ziarah dan peserta Sosialisasi Sadar Wisata dari lingkungan masyarakat Nahdhatul Ulama khususnya generasi muda.
- (3) Kedua belah pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :
- a. Saling berkoordinasi guna mensukseskan program pengembangan dan pelestarian Wisata Ziarah; dan
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia di masing-masing pihak.

Pasal 3 **Koordinasi Kegiatan**

Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini :

- a. PIHAK PERTAMA menunjuk Sekeretaris Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagai koordinator pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini di lingkungan Depbudpar
- b. PIHAK KEDUA menunjuk Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) sebagai koordinator pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama di lingkungan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama

Pasal 4 **Pembiayaan**

Segala pembiayaan yang timbul akibat dari kegiatan kerjasama ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
Ketentuan Lain-lain

- (1) Keterikatan kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 8
Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

K.H Hasyim Muzadi

Ir. Jero Wacik, SE

**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
DENGAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : HK.101/1/1/MPK/04
NOMOR : 111/Skep/2004**

**TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN
DAN WAWASAN ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA
DI BIDANG KEBUDAYAAN**

Pada hari Jum'at tanggal tujuh belas, bulan September tahun dua ribu empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I. Gede Ardika,** : Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta 10110, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Prof. Dr. H. Azrul Azwar, MPH,** : Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 6 Jakarta 10110, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan kebudayaan di lingkungan Gerakan Pramuka.
- b. Bahwa oleh karena itu perlu meningkatkan dan memperluas materi tentang kebudayaan dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan bagi Anggota Gerakan Pramuka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
T U J U A N

Kesepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA ini bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan sebagai upaya memperkokoh jatidiri dan kepribadian bangsa khususnya Anggota Gerakan Pramuka.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan kepada Anggota Gerakan Pramuka.
- b. Penyusunan, penyebarluasan, dan peningkatan pelaksanaan Syarat Kecakapan Umum, dan Syarat Kecakapan Khusus Kebudayaan, dan Tanda Kecakapan Khusus Kebudayaan kepada anggota Gerakan Pramuka.
- c. Program-program lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, akan diatur dalam perjanjian tersendiri antara kedua belah pihak melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang.

Pasal 4
TIM PELAKSANA

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini akan dibentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dengan susunan keanggotaan dari unsur kedua belah pihak.
- (2) Apabila diperlukan ketua kelompok kerja dari masing-masing unsur dapat membentuk tim tertentu selama tidak mempengaruhi sifat dan tujuan kesepakatan Pasal 4 ini.

Pasal 5
P E M B I A Y A A N

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing serta pembiayaan lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang dan diakhiri sebelum jangka waktu seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini , atas kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA , dengan ketentuan pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaannya, tanpa terikat dengan jangka waktu yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
LAIN - LAIN

- (1) Hubungan kedua belah pihak dalam Kesepakatan Bersama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Perubahan dan atau pembatalan sebagian atau seluruh ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini dilakukan berdasarkan Kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara tertulis dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama , satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

I Gede Ardika

Prof. Dr. dr. H. Azrul Azwar.

KESEPAKATAN BERSAMA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DENGAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Nomor : KS. 001/1/6/MKP/2004
Nomor : 947/P/KS/2004

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I Gede Ardika** : Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Prof. Dr. Sofian Effendi : Rektor Universitas Gajah Mada yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gajah Mada, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa perkembangan kepariwisataan di Indonesia saat ini membutuhkan pengelolaan secara menyeluruh dan profesional.
- b. bahwa pembangunan kepariwisataan nasional bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya melalui pendekatan yang saling menguntungkan antara masyarakat, lingkungan budaya dan wisatawan.
- c. bahwa untuk menuju pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan maka diperlukan perangkat perencanaan yang bisa dipertanggung jawabkan secara teknis, layak secara sosial budaya, ekonomi dan lingkungan melalui pendekatan multi disiplin.
- d. bahwa Universitas Gajah Mada sebagai suatu Perguruan Tinggi yang memiliki berbagai rencana disiplin ilmu pengetahuan diharapkan ikut secara aktif menyumbangkan berbagai keahlian dalam pembangunan kepariwisataan nasional.
- e. bahwa Universitas Gajah Mada dengan semua unit-unit kerjanya telah menunjukkan peran serta secara aktif untuk mengembangkan kepariwisataan di Indonesia baik secara formal maupun informal melalui berbagai bentuk kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, berupa sumbangan pikiran pelaksanaan penelitian pengembangan sumber daya manusia dan seminar-seminar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pengembangan pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
T U J U A N

Kesepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program-program pembangunan nasional dibidang pariwisata yang sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Lingkup kesepakatan bersama dalam upaya mencapai tujuan seperti tersebut pada Pasal 1 (satu) melalui :

- a. Pengembangan data dan informasi pariwisata;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia pariwisata ; dan
- c. Kegiatan lainnya yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kewajiban dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang atas kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Keterkaitan kedua belah pihak dalam kesepakatan bersama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), setiap PIHAK memegang 1 (satu) rangkap, masing-masing rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama .

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

I Gede Ardika

Prof. Dr. Sofian Effendi

**AGREEMENT
ON
CULTURAL AND EDUCATIONAL COOPERATION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SPAIN**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Spain, hereinafter referred to as "The Parties".

DESIRING to strengthen the friendly relations the two countries and its people and to promote mutual understanding and knowledge through culture, education, youth and sports;

INSPIRED by a common commitment to enhance within their capabilities, the promotion of cooperation in the afore-mentioned fields on the basis of equality, mutual respect and benefit;

CONVINCED the cooperation is a viable instrument for deepening mutual understanding between both people;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;

HAVE AGREED as follows:

**Article 1
Culture**

The Parties will promote the development of relations between the two countries in the field of culture through:

- a. promoting and facilitating the development of exchanges and research in relation to problems of mutual interest in the fields of culture in the broadest sense;
- b. promoting and facilitating direct contacts in the fields of literature, plastic arts, scenic arts, films, architecture, museums, libraries, archives, archaeology and in other areas of culture;
- c. promoting and facilitating information exchanges and cooperation on measures aimed at conserving and protecting their respective cultural heritage

Article 2

Education

The Parties shall promote the development of relations between the two countries in the fields of education in both countries:

- a. facilitating cooperation, contacts and direct exchanges between the two countries in the field of education :
- b. facilitating the study and teaching of the languages and literature of the other party;
- c. facilitating cooperation and exchanges of teaching methods and materials;
- d. studying the conditions necessary for the mutual recognition of diplomas, degrees and university grades in each of the two countries

Article 3

Youth

The Parties shall promote and facilitate cooperation between young people and youth organizations of both countries.

Articles 4

Sport

The Parties shall promote and facilitate cooperation between sports organization, as well as participation in sports events that take place in the two countries.

Article 5

Seminars

The Parties will facilitate attendance at seminars, festivals, competitions, exhibitions, conferences, symposia and meetings in the fields contemplated in this Agreement and which are held in both countries.

Article 6

Relationship to other International Organizations

The Parties will stimulate cooperation in the fields referred to in this Agreement without prejudice of rights and duties arising to both under other international agreements entered into, and in compliance with the rules of the international organizations to which they belong

Article 7

Joint Cultural and Educational Commission

In order to execute this Agreement and to verify the state of its application, the Parties shall establish a joint Cultural and Educational Commission.

This Commission will be coordinated by the Parties respective Ministries of Foreign Affairs and will comprise of representative form the Parties.

The Joint Cultural and Educational Commission shall evaluate the implementation and prospect of cooperation define the arrangements, programs or projects and supervise their realization.

The Joint Cultural and Educational Commission will meet periodically, alternately in each country : the date and place of meeting will be decide through diplomatic channels

Article 8

Forms of Implementation

Activities described in this Agreement may be implemented through the development of specific arrangements, programs or projects between the appropriate institutions or organization of the parties. Such arrangements, programs or projects should specify, inter-alia, the objectives, financial arrangements and other details relating to specific undertakings of all participants involved.

Article 9

Intellectual Property Right

Any result of activities in the fields of culture, arts and literature which performed under this Agreement shall be subjects to the laws and regulations concerning the protection of intellectual property right and its neighboring rights in the respective territories of the parties insofar as these are not covered by a general agreement on an international character.

Article 10

Budget

The Spanish costs arising from the activities pursued under this Agreement will be charged to the credits provided for in the ordinary budget.

Article 11

Settlement of Dispute

Any disputes between the Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations and/or negotiations.

**Article 12
Amendment**

This Agreement can be reviewed or amended at any time by mutual written consent by the Parties. Such revisions or amendment shall enter into force on such date as may be determined by the Parties and shall an integral part of this Agreement.

**Article 13
Entry into Force, Duration and Termination**

This Agreement shall enter into force on the date of the latest notification by which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that their respective constitutional requirements for giving effect to this Agreement have been fulfilled.

This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall tacitly be extended for another period of 5 (five) years, unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this Agreement 6 (six) months prior to the expiration of this Agreement.

The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of any ongoing programs or activities made under this Agreement until the completion of such programs or activities.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by respective Government, have signed this Agreement.

Done in Madrid on the third day of December in the year two thousand and four, in duplicate, in Indonesian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

ARIZAL EFFENDY
Director General for American
and European Affairs
Department of Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT
OF THE KINGDOM OF SPAIN

BERNARDIONO LEON GROSS
Secretary of State for Foreign Affairs
and Ibero-America
Ministry of Foreign Affairs and
Cooperation

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA
ON
CULTURAL AND EDUCATIONAL COOPERATION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Croatia, hereinafter referred to as the "**Contracting Parties**".

DESIRING to strengthen relations between the two countries, to promote mutual understanding and to establish co-operation and exchange of programs in the fields of culture and education.

INSPIRED by a common commitment to enhance within their capabilities, the promotion of cooperation in the afore-mentioned fields on the basis of equality, mutual respect and benefit;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;

HAVE AGREED as follows:

**Article 1
Culture**

The Contracting Parties shall develop co-operation in the field of culture through:

- 1) Exchange of visits of writers, artists, performers, professionals and amateurs, as well as experts active in the fields covered by this Agreement;
- 2) Organization of cultural and art performances in the territory of the other Contracting Party such as : art exhibition, film, radio and television programs, drama, dance and music performances;
- 3) Exchange and donations of art publications, films, books, journals, music recording and scores, records and tapes between museums and other cultural institutions;
- 4) Promotion of translations and publication of major literary and other works created by the authors of the other country;;
- 5) Co-operations between publishing houses, including distribution of books;

- 6) Joint organization of cultural events such as exhibitions, symposium on previously agreed upon topics;
- 7) Supporting direct co-operation between visual and performing art institutions, to present works created by the artists of the Contracting Parties into the programs of their respective institutions;
- 8) Co-operation between academics, artist and professional associations based on directly mutually agreed programs, protocols or other documents;
- 9) Encouraging co-operation in the fields of research, protection, preservation, conservation and restoration of cultural heritage;
- 10) Encouraging co-operation in the fields of preservation and restoration between archives, museums, libraries and facilitating the access of researches of the Contracting Parties to the holdings/collections of the respective institutions.

Article 2

Education

The Contracting Parties shall develop co-operation in the field of education through :

- 1) Supporting co-operation between educational institutions, including exchange of experiences and programs;
- 2) Encouraging direct co-operation between high education institution, in accordance with the needs and possibilities of the Contracting Parties;
- 3) Encouraging exchange of lecturers, teachers, university professors and students. Such exchange shall be elaborated in the implementation of programs.

Article 3

Audio-Visual Media

The Contracting Parties shall develop co-operation between the institutions in the fields of film and other audio-visual media and support co-operation of film archives and other film institutions and individuals

Article 4

Youth and Sports

The Contracting Parties shall develop co-operation in the fields of youth and sports through:

- 1) Supporting co-operation between youth organizations and sports organizations;
- 2) Exchange of visits of youth, sports team and coaches.

Articles 5

Co-operation in the Framework of UNESCO

The Contracting Parties shall promote active co-operation between their representative and delegates within UNESCO and other international organizations and associations in the fields of culture and education.

Article 6

Joint Commission

- 1) For the purpose of the implementation of this Agreement, the Contracting Parties shall establish a Joint Commission on culture and education, comprising the representatives from their respective ministries or institutions;
- 2) The Joint Commission on culture and education shall review the activities, accomplishments and progress of co-operation carried out under this Agreement, including the forms of exchange, the ways of implementation, financial conditions, as well as supervise their realization;
- 3) The Joint Commission on culture and education shall be held in every year or on the date as mutually agreed upon by the Contracting Parties through diplomatic channels, alternately in Jakarta and in Zagreb

Article 7

Forms of Implementation

Activities mentioned in this Agreement may be implemented through the development of specific arrangement, programs and projects between the institutions or organization of each Contracting Party.

Such arrangements, programs and projects should specify, inter alia, the objectives, financial arrangements and other details relating to specific activities of all the participants involved.

Article 8

Copyright

Any results of activities in the fields of arts and literature which are performed under this Agreement shall be subject to the international agreements in the fields of the protection of copyright and its neighboring rights to which both Contracting Parties are parties of, while the relations not regulated by these international agreements shall be subjects to the respective laws and regulations of the Contracting Party on whose territory such activity is carried out.

Article 9
Settlement of Disputes

Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation and/or negotiation.

Article 10
Amendment

This Agreement can be amended at any time by mutual written consent by both Contracting Parties. Any Amendment agreed upon by the Contracting Parties shall enter into force on such date as will be determined by the Contracting Parties.

Article 11
Entry into Force, Duration and Termination

- 1) This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days after the receipt of the latest notification by which the Contracting Parties inform each other, through diplomatic channels, that their respective internal procedures for the entry into force of this Agreement have been fulfilled;
- 2) This Agreement shall be concluded for a period of 5 (five) years and shall be tacitly renewed for the following periods of 5 (five) years, unless either Contracting Party denounces it in written, through diplomatic channels 6 (six) months prior to the expiration of the current 5 (five) years period;
- 3) The denunciation of this Agreement shall not prejudice the completion of any ongoing program and project made under this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Jakarta on this fifteenth day of February in the year two thousand and two, in Indonesian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF CROATIA

Dr. Makarim Wibisono
Director General for Foreign Economic
Relations, Ministry of Foreign Affairs

Vesna CvjetkovicKurelec, D.Sc
Deputy Minister of
Foreign Affairs

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA
ON
COOPERATION IN TOURISM IN THE SECTOR**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia hereinafter referred to as "the Parties"

Desiring to further strengthen the friendly and cooperative relations between the two countries through tourism based on the principles of equality and mutual benefit.

Recognizing the importance of the tourism sector to the economic, social and cultural development of both countries

Seeking to realize the benefits of wider regional and multilateral cooperation, involvement in the work of International organizations, and support progress on tourism and travel issues within the General Agreement on Trade in Services of the World Trade Organization (GATS-WTO) and the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) forum; and

Wishing to continue taking practical steps to achieve a better understanding of each other's approaches to tourism policy formulation and tourism administration with a view to promoting a strong working relationship between the Parties national tourism ministries.

Have reached the following understanding.

1. Areas of Cooperation

In accordance with the prevailing laws and regulations in each country, cooperation in the tourism sector may be undertaken in the following areas;

- a. Research and Development
- b. Human Resource Development
- c. Promotion
- d. Investment
- e. Private Sector Cooperation, and
- f. Other areas as may be mutually considered appropriate.

The details of cooperation which may be undertaken in such areas will be set out in specific arrangements between the Parties or between tourism or tourism related agencies which, by mutual consent of the implementing authorities for this Memorandum of Understanding and for the specific arrangement, may be added as Annexes forming an integral part of this Memorandum of Understanding. The Arrangements contained in such Annexes may, where appropriate, specify different implementing authorities.

2. Aims of Cooperation

The aims of cooperation under this Memorandum of Understanding are :

- (a) to facilitate the development of tourism relations between both countries;
- (b) to increase tourist arrivals to both countries;
- (c) to facilitate a wider distribution of visitors to the various destinations and attractions in each country;
- (d) to encourage visits of both nationals and residents to each country;
- (e) to encourage the growth of the tourism and travel related industries in both countries;
- (f) to pursue common activities relating to tourism industry and its potential in both countries. The Parties mutually recognize that such activities, among others, should.
 - (1) facilitate the efforts for viable tourism development in both countries;
 - (2) work towards resolving impediments to tourism in and between the two countries, subject to each party's relevant national laws, and;
 - (3) carry out bilateral seminars, symposiums, and/or workshops.
- (g) to examine opportunities for technical cooperation between the Parties in the field of tourism.
- (h) to share information and consult on tourism-related objectives and their implementation in international organizations; and
- (i) to facilitate and foster cooperation between the tourism private sectors in both countries.

3. Implementation

The Government of the Republic of Indonesia hereby nominates the Department of Culture and Tourism and the Government of Australia hereby nominates the Department of Industry, Science and Resources as the implementing authorities for this Memorandum of Understanding. The Parties may nominate other implementing authorities by mutual consent from time to time.

4.Consultation

The Parties will endeavor to address any matters concerning the interpretation of implementation of this Memorandum of Understanding through prompt and friendly consultations and negotiations.

5.Amendment

This Memorandum of Understanding may be added to or amended by the mutual consent of the Parties.

6. Applicability of the Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding does not override specific bilateral agreements and other arrangements relating to the tourism sector consuded between the two countries or between tourism or tourism—related agencies, which are both separate and independent.

7.Commencement, Duration and Termination

The Memorandum of Understanding will come into effect on the date on which it is signed by the Parties. It will be valid for a period of five years and will be automatically renewed for a successive two year period, unless either of the Parties expresses its desire to terminate it, giving the other party three months written notice of such intention.

The termination of this Memorandum of Understanding will not affect the implementation of the programs and projects that may have been formulized during its existence, unless the Parties decide otherwise.

Signed at Canberra in Duplicate , on the twenty sixt day of June 2001 in English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC INDONESIA

Dr. Alwi Shihab
Minister od Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF
AUSTRALIA

Alexander Downer
Minister of Foreign Affairs

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
ON
CULTURAL AND EDUCATIONAL COOPERATION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela, hereinafter referred to as the "**Parties**".

DESIRING to strengthen the friendly relation between the two countries and their people and to promote mutual understanding and knowledge, through cultural relations;

INSPIRED by common commitment to enhance within their capabilities, the promotion of cooperation in the field of culture, education, science, information and sport on the basis of equality, mutual respect and benefit.

CONVINCED that the cooperation is viable instrument for deepening mutual understanding between both peoples;;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;

HAVE AGREED as follows:

Article 1

The Parties shall encourage the exchange of activities in the fields of culture, research science, technology, education, sport, information and documentation, as well as the exchange of visits of delegations between institution and organization from both countries.

Article 2

The Parties shall foster all necessary facilities to organize cultural weeks, film exhibitions, meetings, discussion and poetry reading, musical and visual arts performances, as well as to encourage the exchange of cultural and art groups.

Article 3

The Parties shall promote and inform each other about fairs, festivals, meetings on scientific, research and technology activities, cultural and artistic festival in their respective countries;

and shall encourage, subject to reciprocal treatment and according to their national legislation, the necessary facilities for the participation of the other Party.

Article 4

The Parties shall encourage the cooperation among the libraries and documents centers between both countries.

Article 5

The Parties shall encourage the exchange of publications on history, culture, civilization and geography of both countries, as well as on historic and archeological matters, works and research annals on archeological activities, innovations and initiatives.

Article 6

The Parties shall encourage the cooperation in the fields of museums and archeology.

Article 7

Within its own territory and in conformity with applicable laws and regulations, each Party shall, on reciprocal basis, facilitate the establishment of cultural institutions of the other Party. The term "cultural institution" shall include cultural centers, language centers, schools, libraries and other organization, the purpose of which correspond to the objective of this Agreement;

Article 8

The Parties shall promote and facilitate cooperation among universities and other higher education institutions and research, scientific and technological center.

Article 9

Each Party shall encourage the development of the other Party's language and literature in its respective countries, for this purposes the Parties shall provide the available necessary facilities.

Article 10

Each Party shall provide the other Party information on the educational system, equivalence of school, scientific and university degrees, for better knowledge of their educational systems.

Article 11

The Parties shall promote and facilitate cooperation between the two countries news agencies, radio and television institutions.

Article 12

The Parties shall encourage cooperation in the field of sport between both countries, provide the necessary facilitate for exchanging sport delegations, teams, and coaches in fields of mutual interest, and improve the holding of formal and friendly competitions, and if it is deemed necessary, signing sport agreements.

Article 13

- a. For the purpose of this Agreement, the Parties shall agree to establish a Joint Educational and Cultural Commission which shall comprise of representative or delegates from their respective ministries or institutions.
- b. The Joint Educational and Cultural Commission shall review the activities, accomplishment and progress of cooperation under this Agreement, including the forms of exchange the ways of implementation, financial conditions, and supervise their realization.
- c. The Joint Educational and Cultural Commission's meetings under the chairpersonship of a representative of each country, shall be held every year, alternately in Venezuela or in Indonesia, the date being agreed upon by the parties through diplomatic channels.

Article 14

Activities described in this agreement may be implemented through the development of specific arrangements, programs and projects between the appropriate institutions or organizations of each Party. Such arrangements, programs and projects should specify, inter alia, the objectives, financial arrangements and other details relating to specific undertaking of all the participants involved.

Article 15

The provision of this agreement shall be subject to the laws and regulations in the respective territories of the Parties concerning the protection of the literary and artistic property of each other's nationals cultural treasures insofar as these are not covered by a general agreement on international character.

Article 16

Any dispute arising out of the interpretation and implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations and/or negotiations between the Parties through diplomatic Channels.

Article 17

This Agreement may be amended if it is deemed necessary by mutual written consent by Parties. Any modification or amendment which has been agreed upon by the Parties shall enter into force on the date as will be determined by the Parties.

Article 18

- a) This Agreement shall enter into force on the date of the latest notification by which the Parties inform each other through diplomatic channels, that their respective constitutional requirement for giving effect to this agreement have been fulfilled.
- b) This Agreement shall remain in force for a period of 6 (six) years and shall remain in force thereafter for another period of 6 (six) years, unless either Party notifies in writing of its intention to denounce this Agreement 6 (six) months prior to the expiration of this Agreement.
- c) This Agreement could be denounced at any moment, by one of the Parties, through notification in writing by diplomatic channels taking effect one month after the date of notification. The termination of this Agreement shall not effect the validity and duration of any arrangement, program, and project made under this Agreement until the completion of such arrangement, unless the parties agree otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Caracas on the 19th day of September, in the year two thousand, in the Indonesian, Spanish and English languages. All texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE RPUBLIC OF INDONESIA

GHAFFAR FADYL
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary

FOR THE GOVERNMENT OF
THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF
VENEZUELA

HECTOR NAVARRO DIAZ
Minister of Education, Cultural and
Sport

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND
ON TOURISM COOPERATION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand hereinafter referred to as "the Parties".

Desiring to strengthen the existing friendly relations through the development of tourism between the two countries, and believing that the cooperation would benefit both countries;

Recognizing the importance to the principles of sovereignty, national independence, equality and mutual benefit;

Considering the need to develop and foster the tourism relations, as well as the cooperation between their national tourism organizations;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries;

Have agreed as follows :

Article 1

Aims of Cooperation

This Memorandum of Understanding hereinafter referred to as "MOU" aims to :

1. Increase tourist arrivals to both countries from Indonesia and Thailand as well as from the other tourist generating countries through Indonesia and/or Thailand, as widely distribute the visits to the various tourist destination and attractions in both countries as well;
2. Encourage the healthy growth of tourism in both countries
3. Increase flows of investment and the trade in tourism and travel related services from and to both countries; and
4. Promote human resources development for tourism and travel related industries of both countries.

Articles 2

Areas of Cooperation

The areas of cooperation shall be :

1. Tourism Promotion

- a) The Parties shall cooperate in disseminating tourism promotion materials of each country in both countries;
- b) The Parties shall cooperate in promoting the tourist flows between both countries and endeavor to seek the supply of essential services for that purpose

2. Tourism Product Development

The cooperation in this area shall be undertaken through exchange of experience, study visit to the sites/comparative studies and exchange of information.

3. Private Sector Cooperation

The cooperation in this area shall be further encouraged and strengthened by facilitating the flows of foreign direct investment, trade in tourism and travel related services between the Parties.

4. Human Resources Development

The cooperation in this area shall be undertaken through education and training programs, exchange of information, comparative studies, on the job training and skills improvement for the benefit of the Parties.

5. Research and Development

The Cooperation in this area shall be undertaken through exchange of information, research studies and exchange of experts for the Parties.

Article 3

Executing Agencies

For the purpose of this Memorandum, the Government of the Republic of Indonesia shall designate the Ministry of Culture and Tourism (MCT) and the Government of the Kingdom of Thailand shall designate the Ministry of Tourism and Sports, respectively as their executing agencies.

Article 4

Implementation

1. Activities described in this Memorandum of Understanding may be implemented through the development of specific arrangements, programs or project between the appropriate institutions or organizations of the Parties.
Such arrangements, programs or projects shall specify, inter alia, the objectives, financial arrangement and other details relating to specific undertakings of all participation involved.
2. In facilitating the implementation of this MoU, the Parties agree to establish a Working Group.

3. The Working Group shall set down the procedure plans and recommend programs of cooperation towards achieving its aims through the competent official as mention in Article 3.

Article 5
Copyright

Any result of activities conducted under this Memorandum of Understanding shall be subject of the laws and regulations concerning the protection of copyright and its neighboring right in the respective territories of the Parties in so far as these are not covered by a general agreement of an international character.

Article 6
Settlement of Disputes

Any disputes between the Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and/or negotiations.

Article 7
Amendment

This MoU can be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Parties through diplomatic channels. Such revision of amendments shall enter into force on such date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this MoU.

Article 8
Entry into Force, Duration and Termination

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing. This Memorandum of Understanding shall remain in force for the period of 5 (five) years and shall be automatically renewed for the same period unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this MOU 6 (six) months prior to the expiration of this MOU.

The termination of this MOU shall not affect the validity and duration of any on-going programs or activities carried out under MOU.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments have signed this Memorandum of Understanding.

Done in duplicate at Jakarta on this twenty third day of May in the Year Two Thousand and Three, in English language, all texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT THE
KINGDOM OF THAILAND

I Gede Ardika
State Minister for Culture and Tourism

Dr. Surakiart Sathirathai
Minister of Foreign Affairs

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
ON TOURISM COOPERATION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines, hereinafter referred to as "the Parties".

DESIRING to strengthen the friendly relations and mutual understanding existing between the two countries in the field of tourism.

INSPIRED by a common commitment to enhance within their capabilities, the promotion of cooperation in the afore-mentioned field on the basis of equality, mutual respect and benefit;

COGNIZANT of the role of tourism in their economic development and as a positive instrument towards the improvement of the quality of life for all people;

CONVINCED of the role of tourism as a vital force in promoting peace and better international understanding;;

REFERRING to the Cultural Agreement between the Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia signed at Manila on 28 April 1959 and the Basic Agreement on Economic and Technical Co-operation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines signed at Jakarta on 8 August 1974

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;
Have agreed as follows :

Articles 1

Aims of Cooperation

This Memorandum of Understanding (MOU) aims to :

- a. Increase tourist arrivals to both countries from world tourist generating market, through the Republic of Indonesia and/or through the Republic of the Philippines;
- b. Encourage a wider distribution of visitors to the various tourist destinations and attraction in each other's country;

- c. Encourage visits of both nationals and residents to each other's country; and
- d. Encourage the healthy growth of the tourism industry in both countries.

Article 2

Executing Agencies

- a. The Government of the Republic of Indonesia designates the State Ministry of Culture and Tourism as the agency responsible for the implementation of this Memorandum.
- b. The Government of the Republic of the Philippines designates the Department of Tourism as the agency responsible for the implementation of this Memorandum

Article 3

Areas of Cooperation

Both Parties shall endeavor to promote tourism cooperation in accordance with the laws and regulations of their countries in the following areas :

a. RESEARCH AND DEVELOPMENT

The Parties shall undertake cooperation in the areas of research and development through exchange of information on results of research or studies in areas that shall benefit both Parties.

b. EDUCATION AND TRAINING

The Parties shall undertake cooperation in the areas of education and training through exchange of information, comparative studies on training programs and skills improvement in both public and private sectors.

c. PROMOTION

The Parties shall encourage and promote individual or group travel by their respective citizens and citizens of third countries to Indonesia and the Philippines.

The Parties shall promote tourist flows by air and sea between both countries and shall endeavor to facilitate the supply of essential services for that purpose.

The Parties shall provide support for each other's tourism promotion activities, and whenever necessary, undertake joint promotion programs involving youth and student exchanges, cooperation on advertising, development of joint tour packages, production exchange and dissemination of their respective brochures, films, and photographs including slides, interlaid.

The Parties shall undertake joint promotion programs that include a "twinning program" whereby each Party shall promote and sell the other's destinations jointly with its own in

international tourist markets through joint tourism programs, as well as encourage tourists visiting the countries of the Parties to extend their visits to each other's destinations, which shall all be in compliance with their respective national laws and regulations.

d. **MEETING, INCENTIVE, CONVENTIONS, AND EXHIBITIONS**

The Parties shall undertake cooperative efforts in the areas of meetings, incentives, conventions, and exhibitions through exchange of information on MICE facilities/events, and through joint organization of conference and exhibitions.

e. **PRIVATE SECTOR COOPERATION**

The Parties shall encourage their respective tourism-related establishment, particularly travel agencies and other institution, to establish business contract, to create investment promotion programs, and to exchange experiences and information regarding their existing systems. These establishment shall likewise be encourage to develop joint promotional programs that would market Indonesia and the Philippine under one tour package.

Article 4

Implementation

- a. The Representatives of the designated Executing Agencies of the Parties shall, when necessary, meet alternately in the two countries to assess and monitor the implementation of this Memorandum of Understanding.
- b. To Facilitate the implementation of this Memorandum of Understanding, both Parties shall set down within the procedures, plans and recommended programs of cooperation toward achieving its aims through specific contact offices within their respective competent official agencies as mentioned in Article 2

Article 5

Intellectual Property Rights and Confidentially

The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws and regulations of the Parties. All information acquired or exchanged by virtue of this Memorandum of Understanding shall not be transmitted to a third party without the prior written consent of the other Party.

Article 6

Amendment

Either Party may request in writing an amendment or modification of any part of this Memorandum of Understanding. Such amendment or modification shall enter into force in accordance with the provision on entry into force agreed by both Parties.

Article 7

Settlement of Disputes

Any dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and/or negotiations between the Parties, through diplomatic channels.

Article 8

Entry into Force, Duration and Termination

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of the later written notification by the Parties, indicating that the internal procedure for its entry into force have been complied with.

This Memorandum of Understanding shall remain valid for a period of 5 (five) years and shall be automatically renewed for another 2 (two) years, unless either Party terminates it by giving written notification through diplomatic channels, at least 6 (six) months prior to its expiration.

The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any on-going programs and projects under this Memorandum of Understanding.

In Witness Where of, the undersigned have signed this Memorandum of Understanding.

Done in duplicate at Jakarta on the twelfth day of November in the year of two thousand one in the Indonesia and English language, both text being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

I GEDE ARDIKA
STATE MINISTER OF CULTURE
AND TOURISM

FOR THE GOVERNMENT O
THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

DEONIDES T. CADAY
AMBASSADOR OF THE REPUBLIC
OF THE PHILIPPINES TO
INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN
AND NORTHERN IRELAND
CO-OPERATION IN THE FIELDS OF EDUCATION, SCIENCE AND CULTURE**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (hereinafter referred to as "the Contracting Parties");

Desiring to strengthen and develop the friendly relations between the two countries and their peoples;

Being convinced that exchanges and co-operation in the fields of education, science and culture as well as in other fields contribute to a better mutual knowledge and understanding between the British and the Indonesian people;

Have agreed as follows :

Article 1

The Contracting Parties shall encourage the development of relations between their two countries in the field of education by :

- (a) encouraging and facilitating direct co-operation contact and exchanges between people, institution and organization both public and private concerned with education in the two countries;
- (b) encouraging and facilitating the study of and instruction in the languages and literature of the Contracting Parties;
- (c) encouraging and facilitating co-operation and exchanges in teaching methods and materials, curriculum development and examinations;
- (d) providing scholarship and bursaries and promoting other means to facilitate study and research;
- (e) encouraging co-operation and contact between institution, organizations and individuals in the field of non formal education and continuing education;
- (f) encouraging co-operation and contact between institutions, organizations and individuals in the fields of governance, society and development.

Article 2

The Contracting Parties shall encourage and facilitate the development of exchanges and research on problems of mutual interest in the fields of science and technology, including direct co-operations between scientific and research institutions in the two countries.

Article 3

The Contracting Parties shall encourages and promote cultural co-operations and knowledge of the cultural of either country and shall facilitate direct contact, events and exchange, including exchange of information in the fields of literature, the visual arts, the performing arts, film, television and radio, architecture, archeology, history, cultural and national heritage, museums and galleries, libraries and archives, creative industries and in other cultural areas.

Article 4

Each Contracting Party shall encourage the establishment in its territory of cultural and information centers of the other Contracting Party to organize and carry out activities in pursuit of the purposes of this Agreement, and shall grant every facility within the limits of its legislation and capabilities to assist such centers. The activities of the cultural and information centers shall include language teaching, examination, running libraries and resource centers, exhibitions, conferences, seminars, and workshops.

Article 5

The Contracting Parties shall encourage and facilitate direct co-operation between the two countries in the field of information and communication technology and public information by:

- (a) Promotion and facility the dissemination of information through mass media in particular electronic media and cinema;
- (b) Promoting and facilitating development in press graphics, printing, and mass media;
- (c) Promoting and facilitating the exchange of journalists, publishers, press and publishing organizations, information and public relations officers, radio and television reporters, and television and film artists.

Article 6

The Contracting Parties shall encourage respect for copyright and for intellectual property rights. Activities carried out under the terms of this Agreement shall be subject to the laws and regulations concerning the protection of such rights in their respective territories subject to any applicable international agreement.

Article 7

The Contracting Parties shall encourage and facilitate contacts between young people and direct co-operation between youth organizations of the two countries.

Article 8

The Contracting Parties shall encourage the development of and co-operation in the field of tourism between the two countries.

Article 9

The Contracting Parties shall encourage and facilitate co-operation, development and exchanges in all areas of, but not limited to, physical education and sport, including training, research and development, participation, management, regulation and spectating, in sporting events in each other's countries.

Article 10

The Contracting Parties shall facilitate in appropriate ways attendance at seminars, festivals, competitions, conferences, symposia and meeting in the fields covered by this Agreement and held in either country.

Article 11

The Contracting Parties shall encourage direct co-operation and exchanges between non-governmental organizations in all fields covered by this Agreement.

Article 12

The British Council shall act as principal agent of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia shall act as the coordinator for the Government of Indonesia in the implementation of this Agreement.

Article 13

- (1) This Agreement shall enter into force on the day of signature.
- (2) This Agreement shall remain in force for period of five years and thereafter shall remain in force until the expiry of six months from the date on which either Contracting Party shall have given written notice of termination to the other through the diplomatic channel.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Government, have signed this Agreement.

Done in duplicate at London on 13 June 2002 in the Indonesian and the English languages, both texts being equally authoritative.

Signed
For the Government of the
Republic of Indonesia:

signed
For the Government of
The United Kingdom of Great Britain
And Northern Ireland:

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ALGERIA
ON TOURISM COOPERATION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Democratic Republic of Algeria, hereinafter referred to as "the Parties".

DESIRING to strengthen the friendly relations and mutual understanding existing between the two countries in the fields of tourism;

INSPIRED to enhance the promotion of cooperation in the field of tourism on the basis of equality, mutual respect and benefit;

COGNIZANT of the role of tourism in their economic development and as a positive instrument towards the improvement of the quality of life for all people;

CONVINCED of the role of tourism as a vital force in promoting peace and better international understanding;

REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Democratic Republic of Algeria on Economic and Technical Cooperation signed on April 28th, 1995;

PURSUANT to the prevailing laws and regulation of their respective countries;
Have agreed as follows:

**Article 1
Aims of Cooperation**

This Memorandum of Understanding aims to :

- (a) Increase tourist flows between the two countries;
- (b) Encourage a wider distribution of visitors to the various tourist destinations and attractions in each country;
- (c) Exchange of experience concerning the execution of sustainable tourism development program;

- (d) Promote human resources development for tourism and travel related industries of both countries;
- (e) Promote tourism investment between the two countries;

Article 2

Areas of Cooperation

Both Parties shall endeavor to promote tourism cooperation in accordance with the laws and regulations of their countries in the following areas :

a. TOURISM PROMOTION

1. The Parties shall promote tourism potentialities existent in their countries to introduce them to each other country and intensify tourism flows between them;
2. The Parties shall encourage the mutual participation in the tourism fairs organized in the two countries;
3. The Parties shall encourage encounters between their tour operators during their participation in the specialized international fairs;
4. The Parties shall exchange experiences concerning the conception and execution of promotional and communication programs in the field of tourism.

b. PRODUCT DEVELOPMENT

The cooperation in this area shall be undertaken through exchange of experience in the fields of management and the protection of natural environment of tourism

c. EDUCATION AND TRAINING

The cooperation in the area of education and training shall be undertaken through exchange of officials visits in charge of tourism and experts, exchange of scholarship training, notably in the area of hostelry and tourism.

d. RESEARCH AND DEVELOPMENT

The cooperation in this area shall be undertaken through exchange on information, documentation, laws and regulations

e. PRIVATE SECTOR COOPERATION

1. The Parties shall encourage partnership and investment in the sector of tourism, notably hotels, and business contact between operators of both countries as well as the gathering between their tour operators;
2. The Parties shall exchange legislations and rules related to the tourism investment;
3. The Parties shall exchange experiences in the field of management and commercialization

Article 3
Executing Agencies

For the purpose of this Memorandum of Understanding, the Government of the Republic of Indonesia shall designate the Ministry of Culture and Tourism as the Executing Agency and the Government of the People's Democratic Republic of Algeria shall designate the Ministry of Tourism as the Executing Agency

Article 4
Implementation

Activities described in this Memorandum of Understanding may be implemented through the development of specific arrangements, programs of projects between the appropriate institutions or organizations of the Parties. Such arrangements programs or projects should specify, *inter alia*, the objectives, financial arrangement and other details relating to specific undertaking of all participation involved

Article 5
Working Group

- a. The Parties agree to established a Working Group to facilitate the implementation of this Memorandum of Understanding
- b. The Working Group shall set down the procedure, plans and recommend programs of cooperation towards achieving its aims through the competent official agencies as mentioned in Article 3;
- c. The Working Group shall meet annually alternatively in Indonesia or in Algeria. If it could not be held due to certain circumstances, documents shall be exchanged in lieu of such meeting

Article 6
Copyright

Any result of activities conducted under this Memorandum of Understanding shall be subject to the laws and regulations concerning the protection of copyright and its related right in the respective territories of the Parties so far as these are not covered by a general agreement of an international character

Article 7
Amendment

The Parties may review or amend any part of this Memorandum of Understanding by mutual consent in writing and such amendment shall come into force on a date determined by the Parties and shall serve as an integral part of this Memorandum of Understanding

Article 8
Settlement of Disputes

Any dispute arising out on the interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and/or negotiations between the Parties.

Article 9
Entry Into Force, Duration and Termination

- a. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing.
- b. This Memorandum of Understanding shall remain valid for a period of 5 (five) years and shall be automatically renewed for another 2 (two) years, unless either party terminates it by giving written notification through diplomatic channel, at least 6 (six) months prior to its expiration.
- c. The termination of this Memorandum of Understanding shall not effect the validity and duration of any on-going programs and projects made under this Memorandum of Understanding.

In Witness Whereof, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding. Done in duplicate at Jakarta on the thirteenth day of October, in the year two thousand and three, in Indonesian, Arabic, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

I Gede Ardika
Minister of Culture and Tourism

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE PEOPLE'S DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ALGERIA**

Abdelaziz Belkhadem
Senior Minister
Minister of Foreign Affairs

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE OFFICE OF STATE MINISTRY OF TOURISM AND ARTS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE MINISTRY OF TOURISM AND ANTIQUITIES
OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
ON
COOPERATION IN TOURISM**

The Office of 'State Ministry of Tourism and Arts of the Republic of Indonesia and the Ministry of Tourism and Antiquities of the Hashemite Kingdom of Jordan, hereinafter referred to as "The Parties".

Desiring to strengthen the existing friendly relations between the two countries through the development of tourism cooperation.

Referring to the Agreement on Trade and Economic Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan signed in Jakarta on April 3, 1986;

Considering the need to develop and foster the tourism relations, as well as the cooperation between their official tourism agencies;

Recognizing the importance to the principles of sovereignty, national independence, equality, and mutual benefits;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the Parties;

HAVE AGREED as follows:

**Article 1
Aims of Cooperation**

This Memorandum of Understanding, hereinafter referred to as "MoU", is aimed at:

- a. Encourage visits of both nationals and residents to both countries and widely distribute the visits to the various tourist destinations and attractions in both countries such as that relating to the tourist movements to Islamic Holy Sites and Shrines.
- b. Increase tourist arrival to both countries from tourist generating markets through both countries.

- c. Encourage the healthy growth of the tourism industry in both countries;
- d. Increase flows of investment and trade in tourism and travel related services from and to both countries; and
- e. Promote human resource development for tourism and travel related industries of both countries.

Article 2

Executing Agencies

For the purpose of the MoU, the parties and/or National offices responsible for tourism in both countries will be representing the official agencies for the implementation of agreements resulting from meetings.

Article 3

Areas of Cooperation

Both Parties shall endeavor to promote tourism cooperation in accordance with the laws and regulations of the parties in the following areas;

a. Research and Development

Cooperation in the areas of research and development shall be undertaken through exchange of data and information and research studies that shall be of benefit to the parties.

b. Education and Training

Cooperation in the areas of education and training for both public and private sectors shall be undertaken through exchange of data and information, relating to: comparative studies in training programs, on the job training, skill improvement, and development of skill and competency standards.

c. Promotion

The Parties shall cooperate in tourism promotion activities including the dissemination of tourism materials in their respective countries.

d. Tourism Product

Cooperation in the areas of tourism product development such as preservation and conservation of cultural and natural sites, and other tourism attractions shall be further encouraged and strengthened through exchange of programs, data and information, rules and regulations, exchange of expert, technical assistance. etc.

e. Private Sector Cooperation

The cooperation in the areas of trade and investment in tourism and travel related services between the respective private sectors of both countries would be further encouraged and strengthened.

Article 4
Implementation

- a. The parties agreed to establish a "Working Group", which is aimed to facilitate the implementation of this MOU;
- b. The Working Group shall set down the procedures, plans, and recommended programs and activities towards achieving its aims through the official agencies;
- c. The Working Group shall review the implementation of this MOU, the procedures, plans, recommended programs and activities, and then submit the report to the Executing Agencies; and
- d. The Parties will hold visits of senior official for consultations as deemed necessary in implementing this MOU.

Article 5
Settlement of Disputes

Any differences of the interpretation and applications of the foregoing articles shall be resolved in an amicable manner through consultations between the parties.

Article 6
Amendments

This MoU can be amended or revised. Either Party may request in writing an amendment or revision agreed by the Parties shall come into effect on such a date as may be determined by the Parties.

Article 7
Duration

- a. This MoU shall enter into force on the date of its signing for a period of five (5) years and be automatically extended for two (2) years consecutively unless it is denounced in writing by either Party giving six (6) months in advance;
- b. Should this MoU be terminated, the clause shall remain in force until such time when the implementation of procedures, plans and programs of cooperation has been carried out to its completion.

Both Parties agree to upgrade this MoU to an Agreement of Tourism Cooperation between the Two Governments at a proper time mutually agreed upon.

Signed at the Dead Sea Movenpick Hotels and Resort, the lowest point on earth, in the Hashemite Kingdom of Jordan on the 21 day of June in the year two thousand, in two original copies in the English language. All texts are being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DJAELANI HIDAYAT
STATE MINISTER OF TOURISM
AND ARTS

FOR THE GOVERNMENT OF THE
HASHEMITE KINGDOM JORDAN

AKEL BILTAJI
MINISTER OF TOURISM
AND ANTIQUEITES

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
ON
CULTURAL COOPERATION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China, hereinafter referred to as the "Parties";

Desiring to strengthen the existing friendly relations between Chinese and Indonesian people, and to promote and develop their relations in the fields of culture, education, gender, youth, sports and mass media;

Convinced that the said cooperation is a valuable instrument for enhancing of mutual understanding and friendship between both countries.

Inspired by a common commitment to enhance, within their capabilities, cooperation in the afore-mentioned fields on the basis of equality, mutual respect and benefit;

Referring to the Five Principles of Peaceful Coexistence and the Ten Principles of the Bandung Conference; and to the Joint Statement of the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on the Future Directions of Bilateral Cooperation, done in Beijing on 8th May,2000;

Pursuant to the prevailing laws and regulation in the respective countries;
HAVE AGREED as follows :

Article 1

SCOPE OF COOPERATION

The Parties agreed to promote exchanges and cooperation between the two countries in the fields of culture, education, language, gender perspective, youth, sports and mass media on the basis of equality and mutual benefit.

Article 2

CULTURAL ACTIVITIES

- (1) The Parties shall actively promote exchanges and cooperation between the two countries in the fields of literature, performing art, visual art, artistic education and

cultural industry, and enhance exchange of visits between cultural delegation and artistic performing troupes as well as exchange of artistic exhibition and the exhibitions of craft products.

- (2) The Parties shall encourage and support the establishment of cooperative relations between archaeological institutions, museums, urban development specialists, archives and libraries of the two countries and exchange of visits of professionals as well as exchange of experience.

Article 3

EDUCATION

The Parties shall facilitate exchanges and cooperation between their educational and academic institutions, exchange students through scholarship programs provided by the Parties, upgrading and training for teachers, examiners, and curriculum developers, encourage regular exchanges between experts and scholars, and organize joint researches between the academicians, experts or scholars of the two countries.

Articles 4

GENDER AND YOUTH

The Parties shall encourage and support exchanges and cooperation between the two countries in the fields of gender equity and justice, and youth.

Article 5

SPORTS

The Parties shall encourage and support exchanges and cooperation between the two countries in the field of sports.

Article 6

MASS MEDIA

The Parties shall encourage and support exchanges and cooperation between the two countries in the field of mass media and publication.

Article 7

FRIENDSHIP ORGANISATIONS

The Parties shall encourage and support exchanges and cooperation between friendship and youth organizations of the two countries and their activities conducive to the promotion of mutual understanding and friendship between the two people.

Article 8

NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

The Parties shall encourage and support the exchange of visits and cooperation between non governmental organizations of education, community development, youth and sports, literature, art, religion, women and the handicapped of the two countries.

Article 9

FORMS OF IMPLEMENTAL

Activities described in this Agreement may be implemented through the development of specific arrangements, programs or projects between the appropriate institutions or organizations of each Party. Such arrangements, programs or projects should specify, inter alia, the objectives, financial arrangement and other details relating to specific undertakings of all participants involved. In addition, representative shall meet, if deemed necessary, alternately in Indonesia or China, to examine and assess the implementation of this Agreement.

Article 10

COPYRIGHT

Any result of activities in the fields of arts and literature which performed under this Agreement shall be subject to the laws and regulations concerning the protection of copyright and its neighboring rights in the respective territories of the Parties insofar as these are not covered by a general agreement of an international character.

Article 11

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations and/or negotiations.

Article 12

AMENDMENT

This Agreement can be reviewed at any time by mutual written consent by the Parties. Such revisions or amendments shall enter into force on such a date as will be determined by the Parties and shall form an integral part of this Agreement.

Article 13

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

- (1) This Agreement shall enter into force on the date of the latest notification by which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that their respective constitutional requirements for giving effects to this Agreement have been fulfilled.
- (2) This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall tacitly be extended for another period of 5 (five) years, unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this Agreement 6 (six) months prior to the expiration of this Agreement.
- (3) The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of any program and activity made under this Agreement until the completion of such programs and activities.
- (4) Upon the entry into force of this Agreement, the Agreement on Cultural Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China done at Jakarta on 1 April 1961, shall be automatically terminated.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Jakarta on the seventh day of November in the years two thousand and one, in duplicate, in Indonesian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence on the interpretation of this Agreement, the English texts shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA**

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC
ON
CULTURAL AND EDUCATIONAL COOPERATION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hellenic Republic, hereinafter referred to as **"the Parties"**.

DESIRING to develop cooperation between the two countries in the fields of culture, education, science, mass media, sports and youth.

CONVINCED that such cooperation shall contribute to better mutual understanding and enhancement of relationship at all levels;

INSPIRED by a common commitment to enhance within their capabilities, cooperation in the afore-mentioned fields on the basis of equality, mutual respect and benefit;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;

HAVE AGREED as follows:

**Article 1
Culture**

1. The Parties shall encourage the development of interest in their cultural heritage and a wider knowledge of the cultural achievement of the two countries.
2. To this end, the Parties shall encourage and facilitate, exchange and cooperation between the two countries in the fields of culture and provide appropriate opportunities for contacts and joint activities between the organizations, institutions and persons active in these fields.
3. The Parties shall encourage competent institutions of their respective countries to implement activities that may include among others :
 - a. participation in international congresses, conferences, festivals, competitions and other cultural events organized in the two countries :

- b. the development of cooperation and exchange of experts in the field of culture;
- c. direct cooperation in the fields of common interest between cultural organizations;
- d. the development of cooperation between their national archives, museums and libraries;
- e. the promotion of their active cooperation within international cultural organizations such as UNESCO
- f. the development of cooperation in the fields at archeology and cinema;
- g. exchange of exhibitions and performances

Article 2

Education and Science

The Parties shall encourage and facilitate cooperation in the fields of education and science through:

1. direct cooperation in the fields of higher education, university, and technological education as well as in scientific and research institutions;
2. cooperation in the fields of primary, secondary, professional, vocational, and adult education;
3. organization of joint research, conference and symposia;
4. the development of cooperation and exchange of students, scholars, teachers, lecturers, researches, professors, scientific, libraries, archivists, as well as experts in science and education;
5. exchange of scholarship for university and post-graduate studies as well as research in institution of higher education, on the basis of a mutual consent;
6. exchange of information technology and documentation in order to facilitate their competent authorities in the recognition of certificates, attestations, diplomas, degree and academic titles;
7. the promotion of their active cooperation within international education and scientific organization such as UNESCO, and other relevant regional organizations and for a.

Article 3

Youth and Sports

The Parties shall encourage cooperation in the fields of youth and sports through:

1. establishment of contacts and exchange between young people, as well as cooperation between youth organization and specialist dealing with youth problems of the two countries;
2. cooperation in the fields of sports and physical education;

3. establishment of direct contacts and close cooperation between their respective sports authorities.

Articles 4 Mass Media

The Parties shall encourage cooperation in the field of mass media through:

1. distribution and screening of feature, documentary and educational films of the other country, as well as the promotion of other mutually beneficial activities in the fields of cinematography, radio and television and other audio visual material;
2. cooperation between the news agencies and press organizations of the two countries, as well as exchanges of journalists and press correspondents;
3. participation of representatives in the radio-television area in international competitions, festivals, congresses etc, organized respectively in Greece and Indonesia
4. Contribution to the expansion of contacts and cooperation between their public radio and television organizations

Article 5 Joint Commission

1. For the purpose of the implementation and consideration of matters related to the application of this Agreement, the Parties shall establish a Joint Commission;
2. The Joint Commission shall be composed of representatives of the Parties and will meet according to requirements mutually agreed upon through diplomatic channels;
3. The Joint Commission shall elaborate the details of programs of cooperation as well as their financial terms.

Article 6 Copyright

Any results of activities in the fields of science, arts and literature which were performed under this Agreement shall be subject to the laws and regulations concerning the protection of copyright and its neighboring rights in the respective territories of the Parties insofar as these are not covered by a general agreement on an international character.

Article 7 Settlement of Disputes

Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations and/or negotiations.

Article 8
Amendment

The Agreement may be reviewed or amended at any time by mutual written consent by the Parties. Such revisions or amendments shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Agreement.

Article 9
Entry into Force, Duration and Termination

- 1) This Agreement shall enter into force on the date of the latest notification by which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that their respective constitutional requirements for giving effects to this Agreement have been fulfilled;
- 2) This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall tacitly be extended for another period of 5 (five) years, unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this Agreements 6 (six) months prior to the expiration of this Agreements
- 3) The termination of this Agreement shall not effect the validity and duration of any programs and activity made under this Agreement until the completion of such programs and activities.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Athens on the twenty-fourth day of June in the year two thousand and four, in Indonesian, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE HELENIC REPUBLIC

ARIZAL EFFENDI

PANAYIOTIS SKANDALAKIS

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TUNISIA
ON
COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Tunisia, hereinafter referred to as "the Parties",

Desiring to promote and strengthen friendship and cooperation between the two countries.

Being convinced of the importance of tourism as a factor of economic development and to enhance mutual understanding between their people;

Considering the need to develop and foster the tourism relations as well as cooperation between their official tourist agencies;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the parties;

Have agreed as follows :

Article 1

The Parties agree to take necessary measures so as to encourage and strengthen tourists arrivals to the two countries, and promote cooperation between their official tourism organizations as well as their tourism associations and operators.

Article 2

The Parties will institute and develop information exchange between the two countries on:

1. Administrative organization and tourism development and promotion strategies,
2. Advantage and encouragement for investment of tourism,
3. Personal training system through documentation exchange such as statistic, studies, and films.

Article 3

The Parties shall exchange programs regarding meeting, Incentives, conventions and exhibition and promotion on tourism in the two countries;

Article 4

In order to develop International flow of tourists to two countries, the Parties shall implement all efforts to urge their Tourism National Offices, transport companies and tourism agencies to collaborate in the promotion of tourism products.

Article 5

The Parties agree upon to carry out exchange program on training, education and tourism in the two countries.

Article 6

In pursuance of the implementation of this Memorandum of Understanding the Parties agree to establish a working group which shall undertake annual meeting to follow up the development of tourism between the two countries.

Article 7

This Memorandum of Understanding may be amended or revised by mutual written consent of the two Parties. Such amendment or revision shall enter into force with the provisions of the article 9 paragraph 1.

Article 8

Any dispute arising out of the Interpretation or implementing of this Memorandum shall be settled amicably through consultation and negotiation between the Parties.

Article 9

This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of the receipt of the second notification through which one of the two Parties informs the other Party the accomplishment of its internal procedures.

This Memorandum of Understanding shall be valid for five years from the date of its entry into force. It shall be automatically renewed for a same period, unless terminated by either Party at any time by giving written notice, through the diplomatic channel to the other Party. Termination shall be effective six months after the date of such notice.

In witness where of, the undersigned, representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Done at Tunis on this 2n«† day of July 2003, in two originals, in the Indonesian, Arabic and English languages, all text being equally authentic in case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF TUNISIA

Dr. Makarim Wibisono
Director General For Asia, Pacific
and Africa

Anouar Berrales
Director General For Americas
and Asia

**IN THE NAMA OF ALLAH
THE COMPASSIONATE, THE MERCIFUL**

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
ON
TOURISM COOPERATION**

The government of the Republic of Indonesia and The Government of the Islamic Republic of Iran, hereinafter referred to as "the Parties"

Desiring to strengthen the exiting friendly relations through the development of **cooperation** between the parties;

Considering the need to develop and foster the tourism relations, as well as the cooperation between the parties;

Referring to the Cultural Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran signed in Tehran on 27th of April 1971;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the parties;

HAVE AGREED AS FOLLOWS ;

**ARTICLE 1
AIMS OF COOPERATION**

This Memorandum of Understanding, (hereinafter referred to as "MoU"), is aimed to :

- a. Increase tourist arrival to both countries from the world tourist generating markets, through the Republic of Indonesia and/or through the Islamic Republic of Iran;
- b. Encourage a wider distribution of visitors to the various tourist destinations and attractions in each other's countries
- c. Encourage visits of both nationals and residents to each other's countries, and
- d. encourage the healthy growth of the tourism industry both countries,

ARTICLE 2
AREAS OF COOPERATION

The Parties shall endeavor to promote tourism in the following areas ;

a. Education and Training

Cooperation in the area of education and training which will include exchange of information, comparative studies on training programs, and skill improvement in both public and the private sectors.

b. Promotion

1). The Parties shall cooperate in disseminating tourism promotion material of each country in both countries; and

2). The Parties shall cooperate in promoting the tourist flows between both countries and endeavor to seek the supply of essential services for that purpose.

c. Private Sector Cooperation

The cooperation between the respective private sector of the parties will be further encouraged and strengthened

ARTICLE 3
EXECUTING AGENCIES

For the purpose of this MoU as set fourth in article 1, the Department of Culture and Tourism of the Republic Indonesia and The Ministry of Culture and Islamic Guidance of the Islamic Republic of Iran, or National Offices of the Parties which are responsible for tourism development in both countries will represent as the official agencies.

ARTICLE 4
IMPLEMENTATION

a. The Parties agreed to establish a "Working Group" in facilitating the implementation of this MoU;

b. The Working Group shall set down the procedures, plans, and recommended programs and activities of cooperation towards achieving its aims through the official agencies as mentioned in the article 3;

c. The Working Group shall review the implementation of this MoU regularly and then submit the report to the Executing Agencies; and

d. The Parties will hold visits of senior officials for consultations as deemed necessary in implementing this MOU.

ARTICLE 5
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any differences on the interpretation and applications of the foregoing articles should be resolved in an amicable manner through consultations between the Parties,

ARTICLE 6
AMENDMENTS

This MoU can be amended or revised by mutual concerned of the parties. Either Party may request in writing a revision or an amendment, such revision or amendment shall into effect on such date may be determined by the parties;

ARTICLE 7
ENTRY INTO FORCE

- a. This MoU shall enter into force on the date of its signing ;
- b. This Moue shall be in force for a period of five (5) years and be automatically extended for subsequent period of 5 (five) years each, unless either party denounced it by giving written notification 6 (six) months in advance;
- c. Should this MoU be terminate, the clause shall remain in force until such time when the implementation of the procedures, plans, recommended programs and activities of cooperation has been carried out to its completion.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding,

Done in duplicate in the city of Tehran, Iran on December 16, year two thousand two, corresponding of twenty fifth of Azar 1381 (Iranian Calendar) in English Language,. All texts are being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ISLAMIC REPUBLIK OF IRAN

RINI M SUMARNO SOEWANDI
MINISTER OF INDUSTRY & TRADE

AHMAD MASJED JAMEI
MINISTER OF CULTURE AND
ISLAMIC GUIDANCE

**AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
ON CULTURAL COOPERATION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as " the Parties");

DESIRING to strengthen the friendly relations existing between the Korean and Indonesian people, and to promote and develop their relations in the fields of culture, art, education, and science;

AFFIRMING that cooperation would bring further mutual benefits to the people of the two countries.

PERSUANT to the laws and regulations in their respective countries;

HAVE AGREED as follows;

Article 1

The purpose of this Agreement is to facilitate and encourage cooperation in the fields of culture, art, education, including academic activity in the field of science and technology, public health, mass media of information and education, sports and the games, and journalism in order to contribute to a better knowledge of their respective culture and activities in these field.

Article 2

In order to achieve this purpose, the Parties shall encourage and facilitate :

- (a). reciprocal visits by professors and experts for delivering lectures, study tours, and conducting special courses;
- (b). reciprocal visits by representatives of educational, literary, scientific technical, artistic, sports and journalist associations/organizations and their participation in congresses, conferences, symposia and seminars;
- (c). other educational, scientific, technical, cultural and sports publications, and wherever possible, exchange of art specimen; and
- (d). reciprocal visits by archeologists of one country to the other to gain access to archaeological finds, for training purposes, as well as for exchanging specimens of casts.

Article 3

Each Party shall endeavor to provide facilities and scholarships to students and scientific personnel for the other country seeking to study in its institutions of higher education and research laboratories;

Article 4

Each Party shall endeavor to present diverse facets of the life and culture of the other Party through the media of radio, television and press. To this end, the two Parties shall facilitate exchange of suitable material and programs.

Article 5

The Parties shall facilitate and promote :

- (a) exchange of artists, and dance music ensembles;
- (b) exchange of art and other exhibitions;
- (c) exchange of films, documentaries, radio and television programs recordings and recordings on discs and tapes; and
- (d) exchange of experts in the field of cinematography and participation in each other's international film festivals.

Article 6

The Parties shall encourage reciprocal visits by sports teams and shall facilitate their stay and movement in their respective territories.

Article 7

The Parties shall support the development of the contacts between governmental organizations in the field of youth policy, as well as between the youth organizations and associations officially recognized in their respective countries. They shall encourage exchange of delegations and groups of youngsters, as well as of information and publications on youth issues.

Article 8

The Parties shall, to the extent possible, ensure that text books prescribed for their educational institutions, particularly those relating to history and geography, do not contain any error or misrepresentation of facts about each other's country.

Article 9

Each Party shall encourage the establishment in its territory of cultural institutes and friendship associations devoted to educational and cultural pursuits by the other Party, or

the two Parties jointly; prior consent of the Government concerned shall be obtained before any institute is established under this Article.

Article 10

1. For the fulfillment of the objectives of this Agreement, a Joint Commission may be established by the Parties as and when considered necessary, which shall meet as agreed upon between the Parties at the request of either Party, alternately in Seoul and Jakarta.
2. The Joint Commission will be responsible for reviewing periodically the implementation of this Agreement, advising their Governments by formulating and recommending any items of interest to either Party in the fields envisaged in this Agreement, as well as advising the manner in which the implementation of this Agreement may be improved upon.

Article 11

Any disputes arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation of negotiations between the Parties through diplomatic channels.

Article 12

This Agreement may be amended or revised. Either Party may request in writing a revision or amendment. Any amendment or revision agreed upon by the Parties shall form an integral part of this Agreement. Such revision or amendment shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties.

Article 13

1. This Agreement shall enter into force on the date of the latest notification by both Parties, in writing, that all internal procedures required for the entry into force have been accomplished.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall automatically remain in force thereafter for another period of 5 (five) years each, unless it is denounced by any Party by written notification six month prior to its termination.
3. The termination of this Agreement shall not prejudice the completion of any ongoing programs agreed by the Parties under this Agreement.

IN WITNESS WHEREOFF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Jakarta on 28th day of November in the year of two thousand. Six originals, two in each of the Indonesian, Korean and English languages, all the texts being equally authentic, in case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOREA

**ARRANGEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
CONCERNING
CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME
FOR THE YEARS OF JUCHE 92-94 (2003-2005)**

The Government of the Democratic People's Republic of Korea and the Government of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the "Parties"

Desiring to strengthen the existing friendly relations between the Korean and Indonesian peoples, and to promote and develop their relations in the fields of culture, information and science;

Affirming that the cooperation would bring further mutual benefit for peoples of the two countries;

Referring that the Agreement on Technical and Cultural Cooperation between the government of Democratic People's Republic of Korea and Government of the Republic of Indonesia signed at Jakarta on 15 November 1963.

Bearing in Mind the Memorandum of Understanding on Cooperation in the field of information between the Information Committee of the Democratic People's Republic of Indonesia signed at Pyongyang on 30 September 1985;

Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries;
Have agreed as follows;

Part I

Article 1 : The Parties shall encourage the exchange of the government cultural delegation composed of 3-5 persons for the period of one week.

Article 2 : The Parties shall encourage the participation of the respective delegations in the international and internal art festivals, seminar, and archeological research to be held in both countries;

Article 3 : The Parties shall establish direct contacts between the cultural and art institutions of the two countries to exchange and protect information material publications, musical notes and tapes, video tapes, photographs, book, embroidery, items of cultural property, painting and handicraft exhibition material.

Article 4 : The Parties shall invite each other's delegation to the international film festival to be held in their respective countries;

Part II

Education and Science

Article 5 : The Parties shall strengthen the cooperation between educational and scientific institutions of the two countries;

Article 6 : The Parties shall, encourage the exchange of professors, lectures and experts between the higher educational institutions and exchange of materials on the educational systems and program in the field of compulsory education.

Article 7 : The Parties shall encourage direct contact and cooperation between the universities of the two countries.

Article 8 : The Parties shall encourage the participation of the respective delegations or experts in international conferences, scientific seminar and workshops in the fields of science and education,

Part III

Public Health and Sports

Article 9 : The Parties shall encourage the health care institutions of both countries to establish.

Mutual contact and develop cooperation, such as :

1. Exchange of delegations and exchange of prevention and treatment experience and the materials on all kinds of diseases between the medical, scientific research and treatment institutions of the two countries, and
2. Exchange of experts in the field of cardiovascular surgery.

Article 10 : The Parties shall participate in each other's international sports games and exchange sports teams and experts .

Part IV
Publication and Press

- Article 11 : The Parties shall develop cooperation between the publishing agencies of the two countries and encourage translation and publication of each other's books and pieces of the literature and art.
- Article 12 : The Parties shall encourage the direct contact and cooperation between the radio and television broadcasting organs of the two countries.
- Article 13 : The Parties shall encourage the cooperation between the Korean Central News Agency and the Indonesian Antara News Agency in order to develop the friendly relation,
- Article 14 : The Parties shall exchange video tapes showing each other's history, culture, life, custom, nature and others, as well as organized commemorative broadcasting on each other's important anniversaries including national holiday.
- Article 15: The Parties shall encourage the exchange of each other's broadcasting officials' delegation in order to strengthen the cooperation between the broadcasting stations of the two countries.

Part V
Annex

- Article 16 : General and financial provisions arrangement set out in the Annex shall form an integral part of this arrangement.

Part VI
Final Position

- Article 17 : Any dispute arising out of the interpretations or implementations of this Arrangement shall be settled amicably through consultations between the Parties.
- Article 18 : This Arrangement may be amended, if it is deemed necessary, by mutual consent in writing between the Parties.
- Article 19 : 1. This Arrangement shall enter into force on the date of its signing and end validity until the end of December 2002.;
2. The Termination of this Arrangement shall not prejudice the completion of any on going program and projects under this Arrangement.

Done in duplicate at Pyongyang on 14 April June 92 (2003) in Indonesian, Korean, and English languages, In case of any divergence on interpretation of this Arrangement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
THE REPUBLIC OF INDONESIA

(SIGNED)

FOR THE GOVERNMENT OF THE
DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA

(SIGNED)

**ARRANGEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA
REGARDING
CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME FOR THE YEARS 2001-2003**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as the "Parties");

DESIRING to strengthen their existing friendly relations and closer cooperation between the two countries and their peoples;

REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cultural Cooperation signed at New Delhi on 29 December 1955;

CONSIDERING the need to develop and foster the cultural relations, as well as the cooperation between the two countries;

HAVE AGREED AS FOLLOWS :

Article I

SCOPE OF COOPERATION

1. The Parties shall encourage the translation of classical and modern literatures of each Party. Details shall be worked out mutually through diplomatic channels.
2. The Parties shall exchange one shadow puppet expert. Duration of stay shall be decided in mutual consultations;
3. The Parties shall facilitate exchange of shadow puppets, audio-video recording, photographs, slides, recorded music and publications on performing arts;
4. The Parties shall explore the possibility of comparative study of puppet visual and performing arts.
5. The Parties shall cooperate in the field of archives;
6. The National Library of Indonesia shall exchange publications on mutual exchange, including microfilms with the National Library, Calcutta.

7. The Parties shall exchange library personnel on reciprocal basis to promote library activities in their respective countries including latest techniques of conservation of library materials.
8. The Parties shall exchange reproduction of arts.
9. The Parties shall exchange experts in the fields of archaeology, museology, conservation, restoration and history.
10. The Parties shall exchange publications in the field of archaeology.
11. The Parties shall exchange bibliographies, books, microfiche copies of the two Parties, reprographic copies, e.g. slides, photographs, drawings of art objects, murals, paintings, etc The Parties shall exchange similar documentations on indigenous architecture, sculpture and materials on folk and tribal arts. From the Government of the Republic of India's side, the Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA) shall receive the cultural material and documentation for its National Information System and Data Bank on Art Culture, called the Indira Gandhi Kala Nidhi.
12. The Parties shall exchange or facilitate the acquisition of temporary materials such as house models of villages, textiles, specimens, masks and puppets (both shadow and marionette) for study collections of institutions. IGNCA in India proposes to set up Asian Galleries on these subjects.
13. IGNCA and Indonesian institutions shall participate in seminars and exhibitions to be organized by each Party.
14. The Parties shall organize exhibitions and exchange of books in each Party.
15. The Parties shall organize film-weeks/festivals along with two or three film – delegates from each party.
16. The Present program does not preclude the carrying out of other programs of cooperation in the fields of art, culture and education arranged through diplomatic channels. The implementation of this program shall be reviewed periodically by two Parties through diplomatic channels.

Article II

AREAS OF ACTIVITY

1. The Parties shall exchange three member delegations consisting of an archaeologist, epigraphist and a conservator for a period of two weeks to identify specific areas of activity.
2. The government of the Republic of India shall receive Indonesian researchers and lecturers to study the Tamil language and literature.

3. IGNCA and the Indonesian counterpart shall collaborate in the areas of library automation and joint publication of works on the art and cultural heritage of India in South East Asia.
4. The Parties shall explore the possibility of joint academic programs for two or three months in the field of :
 - a). Prehistoric archaeology;
 - b). Archaeology study;
 - c). Conservation and restoration study on Hindu / Buddhist temples made of stone, brick or rock art.
5. The Parties shall explore the possibility of comparative study of Wayang visual and performing art.
6. The Parties shall encourage participation in international book fairs held in each Party on commercial basis.
7. IGNCA and Indonesian Institutions shall participate in seminars and exhibitions to be organized by each Party.
8. The Parties shall arrange seminars and workshops on belief system, language, history, archeology, conservation and restoration.
9. The Parties shall organize film-weeks/festivals along with two or three film-delegates from each Party.

Article III

ANNEXURE

The general and financial provisions set out the Annexure shall form an integral part of this Arrangement.

Article IV

SETTLEMENT OF DISPUTE

Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Arrangement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

Article V

AMENDMENT

This Arrangement may be amended, if it is deemed necessary, by mutual consent in writing between the Parties;

Article VI

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. The Arrangement shall enter into force on the date of its signing and be valid up to the end of December 2003.
2. The Termination of this Arrangement shall not prejudice to the completion of any ongoing programs and projects under this Arrangement.

DONE in Jakarta on the eleventh day of January in the year two thousand and one, corresponding to the twenty first day of Pausa 1922 (SAKA), in six originals, two each in Indonesian, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Arrangement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

DR. I.G.N. ANOM
Director General of Cultural Affairs
Department of National Education

DR. R. VAIDYANATHA AYYAR
Secretary Department of Culture

**GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS
COVERING THE EXCHANGES
UNDER THE ARRANGEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA
REGARDING
CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME FOR THE YEARS 2001-2003**

**Article I
GENERAL PROVISIONS**

1. Exchange of individuals, exhibitions and delegations :
 - a. Each Party shall send to the other Party the bio-data (including languages spoken) and proposed itinerary at least two months in advance of the expected date of visit of the delegation or individual selected under this Arrangement and at least, four months in advance in the case of performing delegations and exhibitions.
 - b. The receiving Party shall intimate the acceptance or refusal of the proposal within one month after the receipt.
 - c. After the approval has been received, the sending Party shall inform the receiving Party, at least three weeks in advance , of the exact mode and time of arrival of the person/persons;
 - d. Persons invited shall know either the language of the receiving Party, or English.
2. The Parties shall extend facilities to delegations and individuals sent from the other Party to get acquainted with the culture and life of the host Party.

**Article II
FINANCIAL PROVISIONS**

- 1 The aforementioned exchange shall last for six months or less.
- 2 The sending Party shall be responsible for the travel expenses both ways, unless otherwise agreed. The receiving Party shall bear expenses of the following.
- 3 Board and lodging or free lodging and cash allowance to cover expenses for board;
 - a. An allowance to cover incidental expenses.
 - b. An allowance to cover local transport if no conveyance is provided;

- c. Internal travel;
 - d. Exhibition.
- 4 if not agreed otherwise:
- a, The sending party shall cover the costs connected with transportation of the exhibits to the first place of their destination in the receiving party
 - b The receiving party shall cover the costs connected with the transportation of the exhibits to other places within its territory and back to the capital of the sending party;
 - c. The sending party shall ensure at its own expenses the installation of the exhibition and its propagation, including the preparation of catalogues, brochures, etc;
 - d. The sending party shall cover the costs of insurance for the entire period the exhibition is out of its country. In case the sending party suffers any damage to the exhibits, the receiving party is obliged to get all the documentation relating to the damages to enable the sending party to obtain the compensation from the insurance company. The costs connected with the acquisition of the said documentation are to be covered by the receiving party;
 - e. The receiving Party is obliged to show proper interest in the exhibition to take care of it and to comply with the conditions of museographic techniques necessary for adequate protection and preservation of the exhibits.
 - f. The sending Party shall send all the necessary material/description and data concerning the space needed for the exhibition and information for compiling the catalogues, etc ; three months prior to the opening of the exhibition, if possible The exhibits are to be delivered to their place of destination at least six weeks prior to the opening of the exhibition;
 - g. One or more artists, commissioner and official may accompany an exhibition, if considered necessary by the sending Party and shall be provided local hospitality by the receiving Party.
 - h. Every exhibition shall be covered by a special loan agreement signed by both borrowing and sending Party.

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE DEPARTEMENT OF CULTURE AND TOURISM OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTER WITHOUT PORTFOLIO IN CHARGE OF
REGIONAL DEVELOPMENT AND COVERGENCE OF
THE REPUBLIC OF HUNGARY
ON
TOURISM COOPERATION**

The Department of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia and the Minister without Portfolio in charge of Regional Development and Convergence of the Republic of Hungary hereinafter referred to as "the Parties"

Desiring to strengthen the friendly relations between the two countries in the field of tourism;

Noting the official meeting between the President of the Republic of Indonesia and the President of the Republic of Hungary in Budapest on 9 September 2002;

Recognizing the importance of principles of sovereignty, national independence, equality, and mutual benefit;

Considering the role of tourism in their economic development and as a positive instrument towards the improvement of the quality of life for all peoples;
Considering also the need to develop and foster the tourism relations, as well as the cooperation between their official tourist agencies.

Reaffirming the role of tourism as a vital force in promoting peace and better international understanding;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries;

Have agreed as follows;

ARTICLE 1

Aims of Cooperation

This Memorandum of Understanding aims to :

- a. Increase tourist arrivals to both countries and encourage a wider distribution of visitors to the various tourist destinations and attractions in each country;
- b. Encourage visits of both nationals and residents to each country;
- c. Encourage the healthy growth of the tourism industry in both countries;

ARTICLE 2

Areas of Cooperation

The Parties shall endeavor to promote tourism cooperation in the following areas :

a. **MARKETING AND PROMOTION**

The Parties shall encourage and promote individual or group travel between Indonesia and Hungary.

The Parties shall provide support for each other's tourism promotion activities, and whenever necessary, undertake joint promotion program involving culture and students exchanges, cooperation on advertising, development of joint tour packages, production exchange and dissemination of their respective brochures, film and photographs, including slides, interlaid.

b. **PRODUCT DEVELOPMENT**

The cooperation in this area shall be undertaken through exchange of experience, comparative studies, and exchange of information on tourism statistical data.

c. **EDUCATION AND TRAINING**

The cooperation in the area of education and training shall be undertaken through exchange of information, comparative studies on training program, and skills improvement of public sector in both countries;

d. **PRIVATE SECTOR COOPERATION**

The Parties shall encourage their respective tourism related organizations, particularly travel agencies and their institution, to establish business contact, to create investment promotion program, and to exchange experiences and information regarding their existing systems.

ARTICLE 3

Executing Agencies

The Department of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia shall designate the Secretary General of the Department of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia as the Executing Agency.

The Minister without Portfolio in charge of Regional Development and Convergence of the Republic of Hungary shall designate the National Tourist Authority of the Republic Hungary as the Executing Agency.

ARTICLE 4

Implementation

Activities described in this Memorandum of Understanding may be implemented through the development of specific arrangements, programs or projects between the appropriate institutions or organization of the Parties. Such arrangements, programs or projects should specify, inter alia, objectives, financial arrangement and other details relating to specific undertakings of all participation involved.

ARTICLE 5

Working Group

- a. The Parties agree to establish a Working Group to facilitate the implementation of this Memorandum of Understanding;
- b. The Working Group shall establish the procedures, and plan as well as recommend programs of cooperation towards achieving its aims through the executing Agencies as mentioned in Article3;
- c. The Working Group shall meet periodically in Indonesia or in Hungary. Otherwise in the absence of the meeting, the Parties shall exchange the documents.

ARTICLE 6

IPR- Intellectual Property Rights

The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws and regulations of the Parties. All information acquired or exchanged by virtue of this Memorandum of Understanding shall not be transmitted to a third party without the prior written consent of the other Party.

ARTICLE 7

Amendment

Either Party may request in writing an amendment or modification of any part of this Memorandum of Understanding. Any amendment or modification agreed upon by the Parties shall constitute as a part of this Memorandum of Understanding. Such amendment or modification shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties.

ARTICLE 8

Settlement of Dispute

Any dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and/or negotiations.

ARTICLE 9

Entry into Force, Duration and Termination

- a. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing;
- b. This Memorandum of Understanding shall be enforced for a period of 5 (five) years and shall be automatically renewed every 2 (two) years, unless either Party terminates it by giving written notification through diplomatic channel at least 6 (six) months prior to its expiration;
- c. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any on-going programs and projects under this Memorandum of Understanding;

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments have signed this Memorandum of Understanding.

DONE in duplicate in Jakarta, on the twenty-fifth day of July in year two thousand and five in English.

FOR THE DEPARTMENT OF CULTURE
AND TOURISM OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE MINISTER WITHOUT
PORTFOLIO IN CHARGE OF
REGIONAL DEVELOPMENT AND
CONVERGENCE OF THE
REPUBLIC OF HUNGARY

THAMRIN B, BACHRI

ZOLTAN SOMOGY

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
ON
CULTURAL COOPERATION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China, hereinafter referred to as "The Parties".

Desiring to strengthen the existing friendly relations between Chinese and Indonesian people, and to promote and develop their relations in the field of culture, education, gender, youth, sports and mass media;

Convinced that the said cooperation is valuable instrument for enhancing of mutual understanding and friendship between both countries;

Inspired by a common commitment to enhance, within their capabilities, cooperation in the afore-mentioned fields on the basis of equality, mutual respect and benefit;

Referring to the Five Principles of peaceful Coexistence and the Ten Principles of the Bandung Conference; and to the Joint Statement of the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on the Future Directions of Bilateral Cooperation, done in Beijing on 8th May, 2000;

Pursuant to the prevailing laws and regulation in the respective countries;
Have Agreed as follows :

Article 1

Scope of Cooperation

The Parties agreed to promote exchanges and cooperation between the two countries in the fields of culture, education, language, gender perspective ,youth, ,sports and mass media on the basis of equality and mutual benefit;

Article 2

Cultural Activities

(1) The Parties shall actively promote exchanges and cooperation between the two countries in the fields of literature, performing art, visual art, artistic education and

cultural industry, and enhance exchange of visits between cultural delegation and artistic performing troupes as well as exchange of artistic exhibitions of craft products.

- (2) The Parties shall encourage and support the establishment of cooperative relations between archaeological institutions, museums, urban development specialists, archives and libraries of the two countries and exchange of visits of professionals as well as exchange of experience.

Article 3

Education

The Parties shall facilitate exchanges and cooperation between their educational and academic institutions, exchange students through scholarship programs provided by Parties, upgrading and training for teachers, examiners, and curriculum developers, encourage regular exchanges between experts or scholars and organize joint researches between the academicians, experts or scholars of the two countries.

Article 4

Gender and Youth

The Parties shall encourage and support exchanges and cooperation between the two countries in the fields of gender equity and justice, and youth.

Article 5

Sports

The Parties shall encourage and support exchanges and cooperation between the two countries in the fields of sports;

Article 6

Mass Media

The Parties shall encourage and support exchanges and cooperation between the two countries in the fields of Mass Media and publication.

Article 7

Friendship Organizations

The Parties shall encourage and support exchanges and cooperation between friendship and youth organizations of the two countries and their activities conducive to promotion of mutual understanding and friendship between the two peoples.

Article 8

Non Governmental Organizations

The Parties shall encourage and support exchanges visits and cooperation between non governmental organizations of education, community development, youth and sports, literature, art, religion, women and the handicapped of the two countries.

Article 9

Form of Implementation

Activities described in this Agreement may be implemented through the development of specific arrangements, programs or projects between the appropriate institutions or organizations of each Party. Such arrangements, programs or projects should specify, inter alia, the objectives, financial arrangement and other details relating to specific undertakings of all participants involved. In addition, representative shall meet, if deemed necessary, alternately in Indonesia or China, to examine and assess the implementation of this Agreement.

Article 10

Copyright

Any result of activities in the fields of arts and literature which performed under this Agreement shall be subject to the laws and regulations concerning the protection of copyright and its neighboring rights in the respective territories of the Parties insofar as these are not covered by a general agreement of an international character.

Article 11

Settlement of Disputes

Any disputes between the Parties concerning the interpretation and/or implementation of this agreement shall be settled amicably through consultations and/or negotiations.

Article 12

Amendment

This Agreement can be reviewed or amended at any time by mutual written consent by the Parties. Such revisions or amendments shall enter into force on such a date as will be determined by the Parties and shall form an integral part of this Agreement.

Article 13

Entry into Force, Duration and Termination

- (1) This Agreement shall enter into force in the date of the latest notification by which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that their respective constitutional requirements for giving effects to this Agreement have been fulfilled.
- (2) This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall tacitly be extended for another period of 5 (five) years, unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this Agreement 6 (six) months prior to the expiration of this Agreement.
- (3) The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of any program and activity made under this Agreement until the completion of such programs and activities.
- (4) Upon the entry into force of this Agreement, the Agreement on Cultural Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China done at Jakarta on 1 April 1961, shall be automatically terminated.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Jakarta on the seventh day of November in the years two thousand and one, in duplicate, in Indonesian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence on the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA**

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT REPUBLIC OF INDIA
ON
COOPERATION IN FIELD OF TOURISM**

The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Republic of India, hereinafter referred to as "the Parties"

DESIRING to strengthen the friendly relations between the two countries in the field of tourism;

CONSIDERING the need to develop and foster the tourism relations, as well as the cooperation between their official tourist agencies.;

PERSUANT to the prevailing laws and regulations of their parties;

HAVE AGREED as Follows;

**Article 1
Aims of Co-operation**

This Memorandum of Understanding, aims to :

- a. Increase tourist arrivals to both countries from the world tourist generating markets, through the Republic of Indonesia and/or through the Republic of India;
- b. Encourage a wider distribution of visitors to the various tourist destinations and attractions in each country;;
- c. Encourage visits of both nationals and residents to each country;
- d. Encourage the healthy growth of the tourism industry in both countries,

**Article 2
Executing Agencies**

The Parties are committed to keep close relations as regards to the tourism field, through their competent official agencies, which shall be the executive of this Memorandum of Understanding.

In the connection, the official agency for the Government of the Republic of Indonesia the Director General of Tourism Department of Tourism, Art and Culture and for the Government of the Republic of India is the Ministry of Tourism.

Article 3

Areas of Co-operation

Both Parties shall endeavor to promote tourism cooperation in accordance with the laws and regulations of their countries in following areas.

1. Research and Development

(1) Cooperation on the areas of research and development shall be understanding through exchange of information and research student in area that benefit both Parties.

(2) The Parties agree that the parameters established by the World Tourism Organization for gathering and presenting statistic on domestic and international tourism shall have the credibility for exchange information.

2. Education and Training

Cooperation in the areas of education and training shall be undertaken through exchange of information, comparative studies on training programs and skills improvement in both public and the private sectors.

3. Promotion

(1) In the areas of promotion, both Parties shall cooperate in disseminating tourist promotion materials of each country to the other country.

(2) The Parties shall promote the tourist flows between the two countries and shall endeavor to seek the supply of essential services for the purpose.

4. Meeting Incentives, Conventions and Exhibitions

Cooperation in the areas of meeting incentives conventions and exhibitions shall be undertaken through exchange of programs between both countries.

5. Investment

The Parties shall encourage investment enterprises in the filed of tourism, in accordance with their internal legislation.

6. Private Sector Cooperation

The Cooperation in the areas of tourism between the respective private sectors of both countries shall be further encouraged and strengthened.

Article 4

Implementation

- a. Both Parties agree to establish a Working Group to facilitate the implementation of this Memorandum of Understanding.;
- b. The Working Group shall set down the procedures, plans, and recommended programs of cooperation towards achieving its aims through the competent official agencies as mentioned in the article 2;
- c. The Working Group shall review the implementation of this Memorandum of Understanding regularly and submit the report to the Executing Agencies;

Article 5

Settlement of Deputes

Any disputes between the Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and consultations.

Article 6

Amendment

Either Party may request in writing an amendment or modification of any part of this Memorandum of Understanding. Any amendment or modification agreed by both parties shall constitute part of this Memorandum of Understanding. Such amendment or modification shall enter into force on such a date as will be determined by both Parties.

Article 7

Entry Into Force

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing.

Article 8

- a. This Memorandum of Understanding shall be in force for a period of 5 (five) years and shall be automatically be extended for subsequent period of 5 (five) years each. Unless either Party terminates it by giving written notification through diplomatic channel, at least 6 (six) months prior to its expiration.
- b. The termination of this Memorandum of Understanding shall not effect the validity and duration of any arrangement, plans and programs made under this Memorandum of Understanding. until the completion of such arrangement, plans, and programs.

THE WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective, have signed this Memorandum of Understanding.

Done at New Delhi on the 8th day of February, in the year 2000, in duplicate in Indonesia. Hindi and English language. All text being equally authentic. In case of divergence of Interpretation, the English text shall prevail.

(ALWI SHIHAB)

MINISTER OF FOREIGN AFFAIR
ON BEHALF OF THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA

(ANANTH KUMAR)

MINISTER OF TOURISM ON
BEHALF OF THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA

**ARRANGEMENT
BETWEEN
THE STATE MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE NATIONAL TOURISM ADMINISTRATION OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
ON
THE IMPLEMENTATION PLAN OF OUTBOUND TRAVEL
BY CHINESE CITIZENS TO INDONESIA**

The State Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia (MCT) and the National Tourism Administration of the People's Republic of China (CNTA), hereinafter referred to as "The Parties";

Desiring to strengthen the existing friendly relations between the Indonesian and Chinese People's, and to promote and develop their relations in the field of tourism;

Affirming that the cooperation would bring further mutual benefit for the peoples of the two countries;

Referring to the Memorandum of Understanding between the State Ministry of Tourism and Arts of the Republic of Indonesia and the National Tourism Administration of the People's Republic of China signed in Jakarta on July 10, 2000;

Pursuant to the prevailing laws and regulation in the respective countries;

Have agreed as follows:

Article 1

CNTA shall designate 65 authorized travel agencies in China as the operator of Chinese citizens' outbound travel to Indonesia. Similarly, MCT shall designate authorized travel agencies to handle Chinese tour groups in Indonesia.

Article 2

The Parties shall exchange lists of their authorized travel agencies. In the case of any change in the list, the one that makes the change should inform to another in written. A travel agency or any travel agencies, which is (are) not listed anymore in the lists, should be categorized as "unauthorized travel agency" or "unauthorized travel agencies".

Article 3

The administrative institution in charge of tourism of both countries shall request the followings:

- The designated travel agencies of each country have a freedom of choice on their own respective business counterparts, and sign tour contract among them;
- The Indonesian diplomatic mission in China should acknowledge business agreements or contracts concluded among authorized travel agencies;
- The designated travel agencies of both countries should fulfill the following requirements:
 - a. Licensed by an authorized governmental institution.
 - b. Creditable.
 - c. Competent in handling international tourists.
- In case of any violation by the designated travel agencies on the legal rights of tourists and/or the other designated travel agencies as agreed upon, severe punishment shall be imposed based on laws and regulation of each country.

Article 4

The Parties shall provide each other on the followings:

- A list of licensed and creditable shops or specialty shops which recommended tourists to visit.
- A price list of tour packages in Indonesia.
- Hotline complaint numbers specialized for tourists.
- Letters of Commitment made by Indonesian travel agencies which contain their commitment of not to recommend or sell any tour programs those are against the laws and regulation, and not conform with ethnic custom of both countries.

The letters also state that those travel agencies shall not to induce tourist of both countries to be engaged in other optional tour program at their own cost.

Article 5

CNTA reaffirm that the Chinese citizens traveling to Indonesia should be in the form of tour groups. Each group, which has a minimum number of not less than five persons, should depart from and return to the country in-group. A tour leader provided by Chinese travel agencies for each group will be assisted by an Indonesian tour escort to solve any problem encountered by Chinese tourists during their trip in Indonesia.

Article 6

The Chinese side shall require each of the 65 Chinese travel agencies to appoint Courier who will be especially in charge of visa application for the Chinese tourist groups. The Indonesian diplomatic mission in China will recognized their ID Card issued by CNTA for the convenience of visa applications.

Article 7

The Chinese Side shall also provide the following:

- The names of representative as well as the couriers of each travel agency to the Indonesian diplomatic mission in China for record.
- Name list of the members of its tour group, which has been signed by representative of the designated travel agency.
- Visa application forms, which have been completed by all members of the tour group, together with valid passports.

Article 8

The Indonesian diplomatic mission in China shall not accept visa applications for tour groups to Indonesia submitted by any travel agency, unit or individual other than those of 65 designated Chinese travel agencies, or submitted, on behalf or Chinese citizens, by any organization or individual of Indonesia and other countries based in China. If the Indonesian diplomatic mission in China accepts the visa applications, the Chinese side shall not be held responsible for any problem that may consequently arise within Indonesian territory.

Article 9

The Parties shall timely exchange information and data, and work closely together to improve management measures and to ensure its healthy development in order to guarantee the sound implementation of travels of Chinese citizens to Indonesia.

Article 10

The Parties shall request their respective travel agencies to abide the local laws and regulation of the other party and to respect the local ethnic custom.

Article 11

The travel of Chinese citizens' in-groups to Indonesia shall start officially as soon as the relevant preparatory works are completed.

Article 12

Any dispute arising out of the interpretations or implementations of this Arrangement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

Article 13

This Arrangement may be amended, if it is deemed necessary, by mutual consent in writing between the Parties.

Article 14

1. This Arrangement shall enter into force on the date of its signing and shall be reviewed if it is deemed as necessary in the future.
2. The termination of this Arrangement shall not prejudice the completion of any on going programs and projects under this Arrangement.

Done in duplicate at Jakarta, Indonesia, on the seventh day of November in the year of two thousand one in the Indonesian, Chinese, and English languages. All texts are equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Arrangement, the English text shall prevail.

FOR THE STATE MINISTRY
OF CULTURE AND TOURISM
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE NATIONAL TOURISM
ADMINISTRATION OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

I GEDE ARDIKA
STATE MINISTER OF CULTURE
AND TOURISM

CHEN ZHILI
MINISTER OF EDUCATION

PENUTUP

Buku Inventarisasi MOU Dalam dan Luar Negeri Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ini khusus mencakup semua MOU dan Kesepakatan yang dibuat selama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Ini berarti semua MOU dan Kesepakatan tahun 2006 dan selanjutnya akan dilakukan inventarisasi yang sama sehingga memudahkan bagi pejabat yang ditugaskan untuk memantau pelaksanaan dari semua MOU dan Kesepakatan yang pernah dibuat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati semua usaha kita memajukan pariwisata Indonesia guna kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Amin.

Perpustakaan
Jenderal I

382
IN